

Rakyat Merdeka

RI HARUS AKTIF DAMAIKAN DUNIA

■ REDAKSI: 021- 53699507 (EXT 727) FAKS: 021- 53671716 ■ LAYANAN IKLAN: FAX: 021- 5333156 ■ SERVIS PELANGGAN: 021-53674444

Rp 9.000 (LUAR P JAWA Rp 11.000)

Hadiri Puncak Natal Nasional

Prabowo Serukan Pentingnya Politik Damai

PRESIDEN Prabowo Subianto menyerukan pentingnya mengedepankan politik damai tanpa dendam serta memperkuat persatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hal tersebut disampaikan Prabowo pada acara Puncak Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Prabowo tiba di lokasi pukul 19.05 WIB. Kepala Negara didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keduanya mengenakan batik.

Kehadiran Prabowo dan Gibran disambut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus Ketua Panitia Natal Nasional 2025, Maruarar Sirait. Prabowo kemudian memasuki ruangan acara.

Dalam sambutannya, Prabowo mengutip ajaran Nasrani tentang pentingnya memaafkan sesama, sebagaimana tertuang dalam

Alkitab Matius 5:39.

“Kalau pipi kiri kita ditempeleng, kita harus kasih pipi kanan,” kata Prabowo, yang menjelaskan bahwa ajaran tersebut bermakna untuk saling memaafkan dan tidak membalas kebencian dengan kebencian.

Prabowo mengaku memahami ajaran tersebut karena pernah mengenyam pendidikan di sekolah Kristen serta memiliki anggota keluarga yang beragama Nasrani. Ia pun sempat berkelakar di hadapan jemaat bahwa dirinya cukup mengenal kisah-kisah dalam Alkitab, yang disambut tawa hadirin.

Prabowo menegaskan nilai-nilai tersebut relevan untuk diterapkan dalam dunia politik yang kerap diwarnai persaingan keras. Menurut dia, persaingan politik tidak boleh melahirkan rasa dendam, kebencian, atau perpecahan.



NATAL NASIONAL: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan saat menghadiri perayaan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2026). Perayaan Natal Nasional 2025 mengusung tema Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga.

ANTARA FOTO

◆ BERSAMBUNG KE HAL 6

KUHP Yang Baru Tidak Melarang Kritik Pemerintah

Terjadi simpang siur informasi terkait pemahaman pasal-pasal dalam Undang-Undang KUHP dan KUHP baru, yang mulai berlaku 2 Januari 2026. Salah satunya, tentang kritikan terhadap pemerintah. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, KUHP baru tidak melarang masyarakat untuk mengkritik pemerintah.

PERNYATAAN itu disampaikan Supratman dalam konfransi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1/2025). Menteri Hukum Supratman didampingi Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif.

Supratman mengatakan, ada 7 isu yang sering muncul dan dibahas di tengah masyarakat sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) resmi berlaku. Namun, dari 7 itu, ada 3 isu yang paling sering diributkan publik.

“Paling sering kami dengar, dan

sampai hari ini nadanya masih agak sedikit minor,” kata Supratman di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1/2025).

Apa saja? Politisi Partai Gerindra itu menjawab, pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan kepada lembaga negara, kemudian juga yang terkait dengan perzinahan, dan yang ketiga adalah pemidanaan bagi demonstran.

“Jadi, tiga isu ini yang paling menyita waktu bagi kita semua,” ujar Supratman.

Supratman menegaskan, pasal-pa-

◆ BERSAMBUNG KE HAL 6

Vox Populi

CATATAN
Supratman

Catur Dunia Tanpa Wasit

SANKSI ekonomi selama 11 tahun tak mempan. AS akhirnya mengambil jalan pintas: menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya. Tak perlu lama. Hanya butuh dua jam 20 menit. Sangat cepat. Minim biaya. Ringkas.

Aksi ini seperti *hostile takeover*, pengambilalihan paksa sebuah “perusahaan” bernama Venezuela yang dianggap sedang bermasalah.

Selama ini, Amerika Serikat terjebak dalam labirin *nation-building*. Di Afghanistan misalnya, AS berperang selama hampir 20 tahun. Habis triliunan Dolar untuk mengajari rakyatnya “berdemokrasi”.

Sekarang, Amerika Serikat, terutama Presiden Trump, tidak ingin lagi mengubah satu negara dari dalam. Biayanya mahal. Waktunya lama. Cukup dengan serangan kilat. Ambil pemimpinnya. Selesai.

Dari kasus Venezuela ini terlihat bahwa negara besar tidak lagi mengandalkan kekuatan fisik untuk memaksakan agenda serta kepentingannya. Cukup dengan serangan mendadak, satu “perusahaan besar” (berbentuk negara) bisa diakuisisi. Aset-asetnya kemudian diamankan.

Logika yang dibangun, sederhana namun brutal. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di bumi, namun dikelola oleh manajemen yang dianggap buruk dan korup.

◆ BERSAMBUNG KE HAL 6



BICARA KUHP & KUHP: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kanan) bersama Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej memberikan keterangan pers terkait pemberlakuan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (UU KUHP), serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang baru di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Trump Tangkap Presiden Venezuela RI Serukan Dialog, Patuhi Hukum Internasional

PEMERINTAH menyampaikan sikap terkait penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat (AS). Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog guna menjaga stabilitas serta perdamaian dunia.

Pernyataan tersebut ada dalam story Instagram Menteri Luar Negeri Sugiono melalui akunnya, *@sugiono_56*, pada Minggu (4/1/ 2026). Pernyataan ini juga ada di platform X MoFA Indonesia, akun resmi Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu).

Dalam keterangannya, Kemlu mengatakan, Indonesia menyampaikan

keprihatinan yang mendalam atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan, yang berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional serta dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan, serta melemahkan prinsip kedaulatan dan

diplomasi.

“Penting bagi komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka serta menentukan sendiri arah dan masa depan bangsa mereka,” tulis Kemlu.

Kemlu juga mengatakan, Indonesia menyerukan kepada semua pihak agar mengedepankan dialog dan menahan diri, serta mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB dan hukum humaniter internasional, khususnya perlindungan terhadap warga sipil,

◆ BERSAMBUNG KE HAL 6



VERSI
DIGITAL
ARTIKEL INI,
SILAKAN
SCAN QR
CODE

Buntut Kasus Korupsi

Kekayaan Nadiem Melorot Rp 4 Triliun

SUDAH jatuh tertimpa tangga, demikian nasib yang dialami Nadiem Anwar Makarim. Buntut terseret kasus korupsi, kekayaan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) ini melorot Rp 1,5 T menjadi Rp 4 triliun.

Kabar ini diungkap dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi

(Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026). Awalnya, Jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung (Kejagung) mendakwa Nadiem terlibat dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) yang disebut telah merugikan keuangan negara hingga Rp 2,1 triliun.

◆ BERSAMBUNG KE HAL 6

Hari Pertama Sekolah Di Aceh Tamiang Siswa Belajar Di Tenda

Wartawan Rakyat Merdeka, Muhammad Ade Al Kautsar, kembali mengunjungi Aceh Tamiang untuk melihat langsung perkembangan perbaikan wilayah tersebut pasca-dilanda banjir bandang. Berikut laporannya:

EKSKLUSIF
Muhammad Ade Al Kautsar
WARTAWAN RAKYAT MERDEKA
dari Aceh

PAGI-pagi, Azis, siswa kelas 6 SD Tugu Upah, Kecamatan Benda-hara, Aceh Tamiang, sudah tiba di Kompleks Masjid Nurul Mukhlisin, untuk kembali masuk sekolah. Azis datang dengan berjalan kaki sendiri. Biasanya ia datang bersama adiknya, Arief, yang masih kelas 3 SD. Tapi, Senin (5/1/2026), Arief tidak kelihatan.

Teman-teman Azis, rata-rata da-

tang dengan diantar orang tuanya, baik dengan menggunakan motor maupun berjalan kaki. Sebab, ini adalah hari pertama mereka kembali sekolah. Setelah satu bulan lebih libur, akibat sekolah mereka rusak dan penuh lumpur diterjang banjir bandang.

Hingga kini, sebenarnya sekolah

◆ BERSAMBUNG KE HAL 6

Hari Ini, Seluruh Anggota Kabinet Retret Di Hambalang

PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar retret bagi jajaran kabinet, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, hari ini, Selasa (6/1/2026). Retret akan diikuti seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

Kepastian agenda tersebut dikonfirmasi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Senin (5/1/2026), Bima Arya telah menerima undangan resmi untuk menghadiri penataran kabinet jilid II itu. “Ya, betul (saya sudah menerima undangan),” kata Bima, Senin (5/1/2026).

Mantan Wali Kota Bogor dua periode ini mengungkapkan, retret ke-

ungkinan hanya digelar satu hari. Konsepnya tidak jauh berbeda dengan penataran kabinet pertama yang dilaksanakan di Magelang, 24–27 Oktober 2024.

“(Undangan) untuk seluruh anggota kabinet. Ya seperti retreat sebelumnya,” terang politisi PAN ini.

Untuk materi, Bima mengaku belum mendapat informasi detail hal apa yang akan disampaikan Presiden Prabowo. Dia hanya menyebut, ada arahan khusus terkait pakaian yang akan dikenakan para menteri dan wakil menteri dalam retret nanti.

“(Bajunya) cokelat muda atau khaki,” jelas Bima.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Ia membenarkan adanya agenda retret Kabinet Merah Putih di Hambalang.

Viva menyebut, kegiatan tersebut akan berlangsung singkat. “Iya benar, ada retret di Hambalang. Satu hari saja,” ujar Viva Yoga.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy juga akan ikuti retret ini. “Ya ikut lah,” ucap mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini, saat dikonfirmasi wartawan.

Saat ditanya mengenai tema retret yang akan digelar, Muhadjir mengaku

tidak terlibat dalam penentuan konsep kegiatan. “Saya cuma ikut saja, tidak ikut bikin tema,” jawabnya.

Pakar politik dari Universitas Airlangga Prof. Kacung Marijan setuju dengan adanya retret kedua bagi anggota kabinet ini. Menurutnya, penataran kabinet merupakan kebutuhan dalam menjaga soliditas pemerintahan. Kegiatan semacam ini penting agar seluruh kabinet memiliki pemahaman yang sama terhadap visi dan kebijakan Pemerintah.

“Retret itu wajar untuk konsolidasi antarmenteri dan antarsektor. Agar masing-masing menteri tahu persis arah dan langkah yang harus ditempuh

untuk mencapai visi bersama,” ucap Kacung, kepada *Rakyat Merdeka*, Senin (5/1/2026).

Pandangan senada disampaikan Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia (LPI) Ujang Komarudin. Dia menilai, retret kabinet menjadi momentum penyegaran dan penguatan etos kerja jajaran kabinet.

“Tentu retret itu baik dan bagus. Ini untuk penyegaran kembali. Mungkin ada menteri yang lemas, loyo, bahkan ada wakil menteri yang terkena kasus di KPK. Itu menjadi pembelajaran bagi seluruh kabinet,” jelas Ujang.

◆ BERSAMBUNG KE HAL 6



Pengusaha Ancam Pejabat Senior

Karena tak mendapat proyek bernilai miliaran rupiah, seorang pengusaha mengancam pejabat senior di salah satu kementerian. Pengaruh pejabat ini sudah luntur karena bukan lagi kesayangan atasan. ■

Kebijakan Calling Visa Komisi I: Ini Bukan Fasilitas Yang Bebas



WAKIL Ketua Komisi I DPR Sukanta menyoroti penerbitan calling visa bagi sejumlah warga negara Israel yang menimbulkan pertanyaan publik. Karena, isu Israel-Palestina memiliki dimensi moral dan politik yang sangat kuat bagi bangsa Indonesia.

Ia menegaskan, Indonesia dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Oleh karena itu, publik berhak memperoleh penjelasan yang utuh, rasional, dan bernalar ketika muncul data mengenai penerbitan calling visa tersebut.

“Perlu ditegaskan sejak awal, ini bukan visa bebas, bukan fasilitas, dan bukan bentuk normalisasi hubungan. *Calling* visa adalah mekanisme khusus yang bersifat selektif dan sangat ketat,” ujar Sukanta dalam keterangannya, Minggu (4/1/2026). Meski demikian, ia menilai penjelasan administratif semata tidak cukup untuk menjawab isu yang sensitif. Negara perlu memberikan penjelasan politis dan substantif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Saya meminta pemerintah menegaskan bahwa kebijakan calling visa tidak mengubah posisi Indonesia dalam mendukung Palestina dan bukan pintu menuju normalisasi hubungan dengan Israel,” tegas legislator PKS itu. Sukanta juga mendorong pemerintah menjelaskan bahwa *calling* visa merupakan instru-

men pengendalian dan keamanan negara, bukan bentuk kelonggaran. Melalui mekanisme ini, negara justru melakukan proses penyaringan dan pengawasan secara maksimal terhadap setiap individu yang masuk ke wilayah Indonesia.

“Calling visa adalah alat kontrol negara, bukan kemudahan. Mekanisme ini memastikan pengawasan yang paling ketat,” jelasnya. Selain itu, perlu adanya transparansi terbatas namun strategis kepada publik, setidaknya terkait kategori umum tujuan kedatangan, seperti alasan kemanusiaan, keluarga campuran, atau mandat lembaga internasional, tanpa membuka identitas maupun detail sensitif.

Menurut Sukanta, penjelasan sebaiknya disampaikan melalui satu narasi yang konsisten oleh Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi, serta melibatkan DPR secara proaktif. Dalam isu Palestina, keteguhan nilai harus sejalan dengan kejujuran komunikasi. “Penjelasan yang tegas dan proporsional bukanlah kelemahan negara, melainkan tanda kepemimpinan yang dewasa,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyatakan, mekanisme *calling* visa memungkinkan pemerintah mengatur izin masuk secara terbatas dan selektif dengan pertimbangan matang. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan instansi terkait.

“Setiap keputusan mempertimbangkan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, serta kepentingan nasional,” ujar politikus Golkar itu. Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Agus Andrianto memastikan pemberian *calling* visa merupakan tanggung jawab lintas kementerian. Pengajuan visa dikaji oleh tim khusus yang tidak hanya berasal dari kementerian yang dipimpinnya. ■ PYB

FPDIP Kirim Tim Kesehatan Jangkau Kampung Terisolasi Di Sumbar

WAKIL Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman membeberkan perjuangan tim medis dari partainya membantu penanganan pascabencana di Sumbang. Tim Kesehatan DPP PDIP berhasil menembus Kampung Ngalau Gadang, Kenagarian Limau Gadang, pada hari ke-38 pascabencana.

Kampung yang berada di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, ini sempat terisolasi selama beberapa hari. Akses utama terputus setelah jembatan beton sepanjang 20 meter yang menghubungkan Ngalau Gadang dengan kampung tetangga, Limau-Limau, hantuy dihantam banjir bandang pada 28 November 2025 silam.

“Alhamdulillah, Tim Medis DPP PDI Perjuangan yang bergerak di bawah komando Ketua DPP Bidang Kesehatan, Ibu dr Ribka Tjiptaning, berhasil menembus Kampung Ngalau Gadang setelah melalui perjuangan yang luar biasa,” ujar Alex Indra Lukman di Padang, Senin (5/1/2026).

Alex menjelaskan, berdasarkan laporan tim di lapangan, Kampung Ngalau Gadang dihuni 168 kepala keluarga (KK) atau sekitar 678 jiwa. Dari jumlah tersebut, 46 KK atau 243 jiwa terpaksa mengungsi dan saat ini tercatat berada di Kantor Camat Bayang Utara.

Mayoritas warga mengungsi akibat rumah mereka mengalami kerusakan berat. Sebagian rumah hantuy diterjang banjir, tertimbun longsor, atau

rusak parah karena pergeseran struktur tanah sehingga tidak lagi layak dihuni.

“Setibanya di lokasi pada Minggu (4/1/2026), tim yang terdiri dari dokter, perawat, Tim Baguna PDIP, serta kader lainnya langsung memberikan pelayanan medis. Warga yang membutuhkan juga mendapatkan obat-obatan dan vitamin,” terang Alex yang juga ketua DPD PDIP Sumbar itu.

Ia menegaskan, kehadiran tim kesehatan ini merupakan perintah langsung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri untuk menjangkau daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar.

“Tim ini memang ditugaskan khusus untuk layanan medis. Kesehatan warga menjadi prioritas, apalagi penanganannya di masa pemulihan terlihat masih berjalan lambat,” tegasnya.

Secara geografis, Kampung Ngalau Gadang berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl), berjarak kurang lebih 150 kilometer dari Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumbar.

Koordinator Tim Kesehatan PDIP, Farid Anshar Alghifari, menceritakan perjuangan panjang yang harus dilalui untuk mencapai lokasi. Kendaraan dan ambulans yang berangkat dari Padang terpaksa ditinggalkan di titik tertentu.

“Perjalanan dilanjutkan dengan menumpang mobil pikap, kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor, dan dilanjutkan berjalan kaki,” kata Farid. ■ PYB



PRASASTI: Anggota Komisi X DPR, Rendi Astuti (kedua kiri) bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) dan Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno (tengah) menandatangani prasasti saat meresmikan SLB-B Negeri Karya Mulya di Surabaya, Jawa Timur, Senin (5/1/2026). Peresmian dan penerian SLB-B tersebut merupakan bentuk komitmen konkret Pemerintah, khususnya Pemprov Jawa Timur dalam memberikan pelayanan pendidikan berkelanjutan hingga 12 tahun bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

ANTARA FOTO/MOCH ASIMINZ

Catatan Akhir Tahun Komisi VI Terkait Perdagangan Negara Tak Boleh Netral Saat Pasar Global Makin Timpang

Di tengah ekonomi global yang semakin terfragmentasi, perdagangan internasional tidak lagi bisa dipahami sebagai aktivitas netral antara penjual dan pembeli lintas negara. Perdagangan kini menjadi arena persaingan kekuatan modal, teknologi, dan kepentingan geopolitik.

“PERDAGANGAN adalah wajah kehadiran negara di pasar. Jika negara bersikap netral, maka pasar akan dikuasai oleh mereka yang paling kuat modal dan teknologinya, bukan oleh pelaku usaha nasional,” tegas Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, di Jakarta Senin (5/1/2026).

Pernyataan ini, lanjut Darmadi, penting untuk membaca kinerja Kementerian Perdagangan sepanjang tahun berjalan bukan hanya dari sisi realisasi program, tetapi dari arah kebijakan dan keberpihakan jangka panjangnya. “Pandangan bahwa perdagangan bebas otomatis menciptakan kesejahteraan telah lama dikritik para ekonom dunia. Paul Krugman melalui New Trade Theory menegaskan bahwa perdagangan justru cenderung menciptakan konsentrasi pasar akibat skala ekonomi dan dominasi korporasi besar,” katanya.

Dalam praktik global, lanjut

Darmadi, pasar bebas selalu melahirkan pemenang dan yang tersingkir. Tanpa kebijakan negara yang sadar dan aktif, pelaku usaha kecil hampir pasti kalah. Kondisi ini sangat relevan bagi Indonesia. Data menunjukkan bahwa impor barang konsumsi Indonesia masih berada di kisaran USD 20-25 miliar per tahun, dengan porsi signifikan berasal dari produk bernilai tambah rendah yang sesungguhnya bisa diproduksi di dalam negeri. Pada saat yang sama, nilai transaksi e-commerce lintas negara tumbuh dua digit setiap tahun, memperbesar tekanan terhadap produk lokal.

“Kalau kita membuka pasar selebar-lebarnya tanpa instrumen pengaman yang kuat, UMKM kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri,” ujar Darmadi.

Sepanjang tahun berjalan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melakukan



Darmadi Durianto

pengendalian impor, pengawasan barang beredar, misi dagang ke pasar non-tradisional, serta promosi ekspor. Langkah-langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara.

Namun, tegas Darmadi, secara struktural, kebijakan tersebut masih menyisakan persoalan mendasar. Pertama, pengamanan pasar domestik, terutama di sektor perdagangan digital, masih lemah. Produk impor murah masuk melalui platform digital dengan pengawasan standar mutu, asal barang, dan kewajiban perpajakan yang belum optimal. Akibatnya, terjadi kompetisi yang tidak seimbang antara produk lokal dan produk impor.



Mujakkir Zuhri

tas dinilai mampu menghadirkan pengalaman yang otentik, ramah lingkungan, dan memberi manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.

Selain faktor keamanan, Mujakkir menyoroti mahalnya biaya transportasi sebagai penghambat peningkatan kunjungan wisata.

Ia menilai harga tiket pesawat yang terjangkau menjadi kunci untuk mendorong pergerakan wisatawan, terutama ke destinasi dalam negeri. Karena itu, Menteri diminta berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan penyedia jasa penerbangan.

Orientasi Wisata 2026 Komisi VII Minta Fokus Ke Kualitas Pengalaman

ANGGOTA Komisi VII DPR Mujakkir Zuhri meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggeser orientasi pembangunan pariwisata dari kuantitas kunjungan ke kualitas pengalaman wisatawan. Fokus tersebut mencakup nilai ekonomi, keberlanjutan, serta manfaat sosial guna mewujudkan rasa aman bagi wisatawan.

“Ke depan sektor pariwisata harus mengarah pada *zero accidents* atau nol kejadian, sekaligus menghadirkan pengalaman yang berkesan,” ujar Mujakkir dalam keterangannya, Minggu (4/1/2026).

Ia menyoroti sejumlah kecelakaan di kawasan wisata yang menjadi perhatian nasional dan internasional, salah satunya insiden kapal laut di Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat (26/12) malam. Peristiwa tersebut mengakibatkan meninggalnya pelatih Valencia FC, Fernando Martin Carreras.

Menurut Mujakkir, aspek keselamatan dan kenyamanan harus menjadi fokus utama pembenahan sektor pariwisata. Pola perjalanan wisata yang penuh

tantangan perlu dijawab melalui kreativitas dan kolaborasi lintas pihak agar strategi pengembangan pariwisata berjalan tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kunjungan.

Ia menegaskan, keberhasilan pariwisata tidak semata diukur dari jumlah wisatawan, melainkan dari kualitas pengalaman yang dirasakan pengunjung serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

Mujakkir menyebut tren pariwisata 2026 akan mengarah pada lima sektor utama, yakni wellness, ekowisata, gastronomi, budaya otentik, dan adopsi digital. Kelima sektor ini dinilai mampu meningkatkan devisa, memberdayakan komunitas lokal, serta memperkuat daya saing global Indonesia melalui kolaborasi strategis dan pemanfaatan teknologi.

Ia menilai, banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, kini mencari pengalaman yang lebih mendalam, termasuk interaksi dengan kehidupan masyarakat lokal, tradisi, musik, kuliner, hingga cerita di balik seAbuah destinasi. Pendekatan pariwisata berkuali-

Ia menyinggung penurunan kunjungan wisatawan di Bali selama libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 yang diduga dipicu oleh tingginya biaya perjalanan, sementara negara tetangga menawarkan paket wisata lebih murah. “Ini harus kita pikirkan bersama agar biaya perjalanan terjangkau dan perekonomian daerah ikut tumbuh,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Mori Hanafi mendesak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) melakukan inspeksi menyeluruh terhadap seluruh kapal komersial dan kapal wisata yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Desakan ini berkaca pada rentetan kecelakaan kapal wisata di Labuan Bajo yang menelan korban jiwa.

Mori menegaskan, peringatan cuaca ekstrem telah disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sejak jauh hari, sehingga tidak boleh ada kelalaian di lapangan. “Kepatuhan terhadap larangan berlayar, kelayakan kapal, kesiapan awak, dan kelengkapan alat keselamatan harus ditegak-

kan,” tegasnya.

Ia menilai, NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia harus menempatkan keselamatan wisatawan sebagai prioritas utama, khususnya di kawasan Gili Trawana yang menjadi pusat wisata bahari. Pengawasan kapal wisata harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh, terutama saat cuaca ekstrem dan lonjakan aktivitas wisata laut.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan keamanan wisata pada 2026. Kemenpar akan fokus pada pelatihan, pendampingan, dan edukasi bagi sumber daya manusia di sektor transportasi dan usaha pariwisata.

Widiyanti menyatakan, kondisi cuaca ekstrem yang terjadi belakangan memperkuat urgensi peningkatan keamanan wisata. Oleh karena itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan diperkuat mengingat sektor pariwisata bersinggungan dengan banyak pihak. “Kami ingin berkoordinasi lebih baik lagi,” pungkasnya. ■ TIF

	Judul Buku : JOKOWINOMIC: Menimbang Pertumbuhan Ekonomi, Menuntuti Keadilan Penulis : Amir Uskara Penerbit : RMBBooks Halaman : 336 Halaman Harga : Rp80.000,- Buku ini tidak sekadar menyuguhkan laporan ekonomi, dan tidak pula hadir sebagai narasi politik. Ia lahir dari kegelisahan yang lebih mendasar: bahwa di balik gegap gempita pembangunan dan pertumbuhan ekonomi era Jokowi yang terus dipuja, ada pertanyaan yang perlu jawaban lugas, apakah pertumbuhan sudah berkualitas dan untuk siapakah pertumbuhan itu?							
Rp75.000,-	Rp75.000,-	Rp115.000,-	Rp85.000,-	Rp70.000,-	Rp70.000,-	Rp230.000,-		

Dapatkan di GRAMEDIA, rmbbooks.id, dan toko online lainnya | Head Office: Gedung Graha Pena Lt. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12 Jakarta Selatan | Informasi Pemesanan Buku Hubungi: 0857 7918 9431



Evaluasi Nataru Kemenhub Siapkan Pembatasan Angkutan Barang Saat Lebaran



Dudy Purwagandhi

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) akan kembali memperketat operasional kendaraan angkutan barang pada periode Lebaran 2026. Pembatasan tersebut akan diberlakukan lebih ketat dibandingkan masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi saat menutup Posko Nataru 2025/2026 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Dudy mengatakan, pembatasan operasional truk logistik, khususnya truk sumbu tiga akan dilakukan lebih ketat, mengingat volume pergerakan masyarakat saat Lebaran diperkirakan jauh lebih tinggi dibandingkan Nataru.

“Kalau Nataru kemarin sifatnya dinamis, kita melihat kondisi. Tapi saat Lebaran volumenya akan lebih meningkat, sehingga kita akan lebih *strict* terhadap pemberlakuan pembatasan,” tegas Dudy.

Eks Komisaris PLN ini menjelaskan, kebijakan pembatasan truk logistik dilakukan dengan mempertimbangan aspek keselamatan pengguna jalan, baik di jalan tol maupun jalan arteri.

Pada masa libur Nataru 2025/2026, Kemenhub sempat memberlakukan kebijakan window time bagi truk logistik. Namun, aturan tersebut dihapus pada hari kedua masa Angkutan Nataru karena dinilai kurang efektif.

Dalam pelaksanaannya, arus kendaraan logistik cukup besar, sehingga dikhawatirkan mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.

Dudy menambahkan, dalam penyusunan kebijakan pembatasan Lebaran, Pemerintah akan melibatkan para pelaku usaha logistik agar aktivitas distribusi barang tetap dapat berjalan dengan lancar.

Terlebih, Hari Raya Idul Fitri diperkirakan jatuh pada 21-22 Maret 2026.

“Pada Januari ini kami harapkan sudah bisa memberikan keputusan terkait mekanisme pengaturan transportasi logistik, khususnya di jalan raya,”

katanya.

Selain pembatasan angkutan barang, Dudy juga menyoroti efektivitas kebijakan *Work From Anywhere* (WFA) dalam mengurai kepadatan lalu lintas.

Menurutnya, WFA terbukti mampu menyebar pergerakan masyarakat, sehingga lonjakan kendaraan tidak terjadi secara bersamaan.

“Kebijakan WFA akan kembali kami kaji untuk Lebaran mendatang. Bergantung pada hasil survei dan analisis kepadatan lalu lintas,” jelasnya.

Dudy berharap, evaluasi dan pembelajaran pada penyelenggaraan Nataru menjadi bekal bagi seluruh stakeholder untuk menyiapkan Angkutan Lebaran 2026.

“Semoga Angkutan Lebaran tahun ini dapat berlangsung lebih aman, selamat dan tertib,” ucapnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal *Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia* (ALFI) Trismawan Sanjaya berharap, Pemerintah dapat mengumumkan kebijakan pembatasan angkutan barang setidaknya 60 hari sebelum diberlakukan.

Hal ini dinilai penting agar pelaku usaha logistik memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan kegiatan operasionalnya.

“Dengan waktu yang cukup, industri manufaktur dan perdagangan masih memiliki ruang untuk persiapan eksekusi barang impor, ekspor, maupun distribusi domestik,” kata Trismawan.

Dia juga menilai, pembatasan angkutan barang seharusnya dapat diminimalkan jika Pemerintah mampu mengelola pemisahan jalur penumpang dan logistik secara bijak serta menyediakan infrastruktur jalan khusus logistik yang memadai.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mencatat adanya penurunan volume pengiriman pasca diberlakukannya pembatasan truk sumbu tiga atau lebih. Termasuk truk gandengan, tempelan, serta kendaraan pengangkut galian, tambang, dan bahan bangunan selama Nataru 2025/2026.

Menurut Mahendra, penurunan volume pengiriman pada sejumlah anggota asosiasi mencapai 20-25 persen.

Kondisi ini dipicu oleh keterlambatan pengiriman ke pelabuhan internasional, serta keputusan pelaku usaha untuk menunda pengiriman hingga masa pembatasan berakhir.

“Daripada terkena biaya tambahan karena melanggar aturan dan biaya transit di Singapura, pelaku usaha akhirnya memilih menahan pengiriman,” jelasnya.

Mahendra menambahkan, kondisi tersebut berbeda dengan tahun 2024. Perusahaan logistik masih tetap melakukan pengiriman meski ada pembatasan. Namun, tingginya biaya tambahan membuat strategi tersebut tidak lagi dipilih pada 2025. ■ KPJ

99 Kalau Nataru kemarin sifatnya dinamis, kita melihat kondisi. Tapi saat Lebaran volumenya akan lebih meningkat, sehingga kita akan lebih strict terhadap pemberlakuan pembatasan.



TERIMA DUBES

BANGLADESH:

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti (kiri) menerima kunjungan Duta Besar Bangladesh Tarikul Islam di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (5/1/2026). Pertemuan ini membahas, antara lain terkait perdagangan bilateral Indonesia-Bangladesh, perkembangan Perundingan Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement (IB-PTA), serta rencana akses Bangladesh ke Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

DOK KEMENDAG

Kemkomdigi Genjot Perbaikan BTS

Jaringan Internet Aceh Sudah Pulih 95 Persen

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus mempercepat perbaikan *Base Transceiver Station* (BTS) terdampak bencana. Saat ini jaringan internet Aceh sudah pulih 95 persen.

MENTERI Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menerangkan, Pemerintah memprioritaskan pemulihan jaringan di wilayah terdampak bencana, terutama Aceh. Dia mengatakan, jaringan telekomunikasi nasional tetap stabil meski trafik meningkat selama libur panjang.

“Pemulihan konektivitas di Aceh sudah melampaui 95 persen dan terus kami percepat,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (5/1/2026).

Meutya menjelaskan, pemantauan kualitas layanan dilakukan sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Pemantauan dilakukan lewat 35 posko Unit Pelaksana Teknis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kemkomdigi serta 255 posko bersama operator seluler.

“Kami memastikan layanan tetap terjaga agar masyarakat bisa berkomunikasi dan mengakses informasi,” katanya.

Hasil pemantauan menunjukkan jaringan nasional mampu melayani lonjakan trafik selama puncak liburan. Kecepatan internet rata-rata nasional tercatat 80,58 Mbps untuk unduh dan 35,36 Mbps untuk unggah di 104 kabupaten dan kota.

“Kondisi jaringan nasional relatif stabil selama periode libur panjang,” kata politisi Partai Golkar ini.

Meutya menuturkan, fokus khusus diberikan ke wilayah bencana agar warga tetap terhubung. Dari total 3.208 BTS di Aceh, hanya tujuh BTS yang masih dalam proses perbaikan. Capaian tersebut sudah luar biasa. “Sebagian besar BTS sudah kembali aktif dan beroperasi dengan uptime cukup tinggi,” katanya.

Pemulihan jaringan di Aceh dilakukan dengan pendekatan lapangan. Pemerintah hadir langsung bersama operator untuk memastikan perbaikan berjalan

sesuai kondisi riil di lokasi terdampak.

“Kami turun langsung karena kondisi lapangan tidak bisa diselesaikan dari jauh,” ucapnya.

Meutya menjelaskan, koordinasi intens dilakukan dengan operator seluler agar pemulihan berjalan serempak. Langkah ini penting supaya layanan dasar komunikasi bisa segera dinikmati masyarakat.

“Komunikasi menjadi kebutuhan utama warga saat menghadapi situasi darurat,” katanya.

Menurut Meutya, pemulihan jaringan dilakukan sambil menyesuaikan kondisi lapangan. Pasokan listrik yang belum sepenuhnya pulih membuat sebagian BTS masih bergantung pada genset dan baterai. “Kami optimistis sisa perbaikan bisa dituntaskan,” tegasnya.

Dia menegaskan, pemantauan jaringan tetap berlanjut meski posko libur panjang ditutup. Pemerintah bersama operator akan terus menjaga kualitas layanan sebagai bekal menghadapi lonjakan trafik berikutnya, termasuk libur Lebaran.

“Pengalaman ini jadi bahan

perbaikan agar layanan publik ke depan lebih siap,” tuturnya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menambahkan, Pemerintah memobilisasi genset untuk menghidupkan menara BTS di wilayah terdampak. Tanpa pasokan listrik stabil, sinyal telekomunikasi berpotensi naik turun.

“Kami fokus menghidupkan BTS agar layanan tidak sering terputus,” katanya.

Nezar menjelaskan, penggunaan genset memiliki keterbatasan karena tidak bisa beroperasi 24 jam penuh. Karena itu, koordinasi lintas sektor dilakukan untuk menjaga suplai bahan bakar minyak.

“Kami sudah berkoordinasi agar distribusi BBM ke wilayah kritis tetap terjaga,” terangnya.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi Fadhilah Mathar mengatakan, Pemerintah menyiapkan akses internet di lokasi bencana. Langkah ini dilakukan untuk mendukung komunikasi darurat dan penyaluran bantuan.

“Kami fokus menghadirkan

konektivitas langsung ke lokasi terdampak,” katanya.

Fadhilah menyebut, selama masa tanggap darurat, BAKTI telah membangun dan menyiagakan jaringan di 18 titik. Masyarakat bisa menikmati akses internet gratis dengan kecepatan hingga 100 Mbps, bahkan sebagian mencapai 200 Mbps per terminal.

“Akses internet gratis ini diharapkan membantu warga dan petugas di lapangan,” bebernya.

Di Aceh Tamiang, pemulihan jaringan menjadi penanda awal pulihnya aktivitas warga. Kembalinya sinyal memudahkan komunikasi keluarga dan memperlancar distribusi bantuan pascabencana banjir dan longsor.

“Kalau sinyal sudah ada, aktivitas warga perlahan kembali berjalan,” kata seorang warga bernama Fariani.

Ibu rumah tangga di Aceh Tamiang ini merasakan langsung dampak pulihnya jaringan. Dia mengaku kembali bisa berkomunikasi dan mengetahui kondisi di luar wilayah terdampak. “*Alhamdulillah*, sekarang sudah bisa komunikasi dan tahu kabar keluarga,” ucapnya. ■ JAR

Jejak Program Prioritas

Guru Terdampak Bencana Dapat Tunjangan Khusus

BENCANA alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia tidak hanya merusak permukiman dan aktivitas ekonomi warga, tetapi juga mengganggu proses belajar mengajar. Di tengah kondisi darurat tersebut, para guru yang ikut terdampak tetap berupaya hadir mendampingi murid-muridnya agar pendidikan tetap berjalan.

Untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan tunjangan khusus bagi guru terdampak bencana. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 35 miliar dan diharapkan dapat menopang kehidupan para pendidik sekaligus memastikan kegiatan belajar mengajar tidak terhenti di wilayah terdampak.

Neli Eriani, guru Sekolah Me-



Neli Eriani

nengah Atas Negeri (SMAN) Agam Cendekia, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), menjadi salah satu penerima tunjangan tersebut. Dia mengaku, bantuan itu sangat berarti di te-

ngah situasi sulit pascabencana.

“Saya penerima tunjangan guru terdampak bencana dan insya Allah akan memanfaatkannya sebaik-baiknya,” ujar Neli dikutip dari keterangan video Tim Media Presiden, Minggu (4/1/2027).

Perhatian dari Pemerintah, menurut dia, memberi suntikan semangat baru bagi para guru untuk tetap menjalankan tugasnya.

“Saya juga bertekad untuk melayani murid-murid dalam pembelajaran,” imbuhnya.

Hal serupa dirasakan Dina Ispanti, guru SMAN 1 Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bantuan tunjangan khusus membantunya dan rekan-rekan guru memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah bencana melanda wilayah mereka.

Dari Aceh, Yusrawati, guru taman kanak-kanak Ar Raihan di Bireuen, berharap dukungan Pemerintah dapat memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan tanpa hambatan berarti. Menurut dia, kehadiran negara di masa sulit memberi ketenangan bagi para pendidik untuk tetap fokus mengajar.

Apresiasi juga disampaikan oleh para guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Batang Natal, Sumatera Utara. Mereka menilai, perhatian Pemerintah menunjukkan kepedulian terhadap peran guru di tengah situasi darurat.

“Terima kasih kepada Presiden dan Mendikdasmen atas perhatian kepada guru terdampak bencana,” ujar para guru tersebut.

Saat ini, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyalurkan tunjangan khusus secara bertahap dengan total nilai Rp 35 miliar. Bantuan tersebut diberikan kepada 16.467 pendidik dan tenaga kependidikan dari 800 satuan pendidikan.

Para penerima berasal dari wilayah terdampak banjir bandang di Aceh, Sumut dan Sumbar serta banjir lahar Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Data kementerian mencatat, penerima bantuan terdiri atas 915 pendidik pendidikan anak usia dini, 10.274 pendidik jenjang pendidikan dasar dan 5.258 pendidik jenjang pendidikan menengah. ■ JAR

Sambangi Braga & Cihapit Bandung

Menteri Ekraf Siapkan IP Lokal Jabar Go Global



LIHAT RUANG KREASI: Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya (tengah) saat meninjau ruang kreatif di Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/1/2026).

MENTERI Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya meninjau sejumlah ruang kreatif di Kota Bandung, Jawa Barat, di sela libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Jumat (2/1/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung geliat ekonomi kreatif daerah, sekaligus mendorong penguatan *Intellectual Property* (IP) lokal agar naik kelas hingga pasar global.

Dari kawasan Braga hingga Pasar Cihapit, Riefky menegaskan bahwa ruang-ruang kreatif di daerah memiliki peran strategis sebagai etalase karya dan bisnis kreatif. Menurutnya, momentum libur Nataru menjadi kesem-

patan emas bagi pelaku ekraf memperkenalkan produk dan IP lokal kepada masyarakat yang lebih luas.

“Ruang kreatif di daerah seperti Bandung adalah fondasi penting ekonomi kreatif nasional. Di sinilah karya, ide dan bisnis kreatif tumbuh serta bertemu langsung dengan pasar,” ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Senin (5/1/2026).

Di kawasan Braga, Riefky menyambangi Braga Grey Art dan Tahilalats Store. Dalam dialog bersama pelaku ekraf lintas subsektor, Riefky menegaskan peran Kementerian Ekraf sebagai akselerator dan enabler melalui

kolaborasi hexahelix yang melibatkan Pemerintah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, media dan lembaga keuangan.

“Local hero kita dorong naik ke tingkat nasional. Yang sudah kuat di nasional, kita akselerasi ke pasar global. Penguatan harus dimulai dari daerah,” tegasnya.

Di Tahilalats Store, Riefky menyoroti keberhasilan pemanfaatan IP lokal yang berkembang dari platform digital ke ruang ritel fisik. Model ini dinilai mampu memperluas jangkauan konsumen dan meningkatkan nilai ekonomi IP kreatif.

Kunjungan dilanjutkan ke Pasar Cihapit yang menjadi

pusat aktivitas ekonomi kreatif, khususnya subsektor kuliner, fesyen, dan ritel. Sejumlah pelaku usaha seperti Batagor Kahuripan, Toko Kopi Pasar Cihapit, Cerita Manis, hingga jenama fesyen Damakara dan ruang ritel Grammars memanfaatkan momen libur awal tahun untuk meningkatkan penjualan.

Menurut Riefky, pasar memiliki peran penting dalam rantai nilai ekonomi kreatif karena menjadi titik langsung terjadinya transaksi, konsumsi produk lokal, sekaligus penggerak wisata kota.

“Dari pasar ekonomi kreatif, produk lokal dikenal, dibeli dan tumbuh. Inilah salah satu mo-

tor penggerak ekonomi baru,” ujarnya.

Riefky menilai, keberagaman subsektor dalam satu kawasan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan meningkatkan daya tarik wisata. Aktivitas pasar ekraf selama Nataru juga sejalan dengan agenda Asta Ekraf untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai *the new engine of growth*.

Dalam kunjungan tersebut, Riefky didampingi Deputi Bidang Pengembangan Strategis Cecep Rukendi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan, serta jajaran Kemenekraf dan Disbudpar Jawa Barat. ■ JAR

Laporan Pengaduan HAM Naik Kepercayaan Publik Mulai Meningkat

JUMLAH pengaduan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterima Pemerintah melonjak tajam sepanjang 2025.

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) mencatat, 1.372 laporan masyarakat meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Lonjakan ini mencerminkan menguatnya kepercayaan publik terhadap negara dalam penanganan isu HAM.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 604 laporan masuk melalui kantor pusat dan 768 laporan diterima melalui kantor wilayah.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, jumlah laporan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pengaduan masyarakat yang diterima Pemerintah saat Direktorat Jenderal HAM masih berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

“Kalau dulu cuma 70 pengaduan yang masuk. Sekarang sudah 1.300-an,” kata Pigai dalam acara Kaleidoskop Kinerja Kementerian HAM 2025 di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Berdasarkan sebaran wilayah, daerah dengan laporan terbanyak adalah Jakarta dengan 129 laporan. Disusul Jawa Barat sebanyak 75 laporan, serta Jawa Tengah dan Kalimantan Timur yang masing-masing mencatat 38 laporan.

Sementara, kantor wilayah Kementerian HAM dengan jumlah laporan tertinggi, antara lain Sumatera Utara sebanyak 153 laporan, Jawa Timur 75 laporan, Nusa Tenggara Timur 61 laporan dan Sumatera Barat 30 laporan.

“Dulu di bawah 100, sekarang sudah 1.300-an pengaduan. Artinya, kepercayaan kepada Pemerintah makin meningkat, khususnya kepercayaan kepada Kementerian HAM,” ujar Pigai.

Sebagai kementerian yang relatif baru berdiri, Kementerian HAM juga mengakselerasi pengarusutamaan HAM melalui pembentukan regulasi. Sepanjang 2025, kementerian ini telah menerbitkan 17 Peraturan Menteri (Permen).

Salah satunya adalah Peraturan Menteri HAM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan HAM.

“Tujuh belas permen ini menjadi regulasi yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia, hasil produksi dari Kementerian HAM,” kata Pigai.

Mantan anggota Komisi Nasional HAM itu juga memaparkan capaian Indeks HAM tahun 2025 yang mencapai skor 63,20. Capaian tertinggi terlihat pada aspek hak atas pangan serta hak atas kebebasan berekspresi.

Hak atas pangan memperoleh skor tertinggi dalam dimensi ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Sementara, kebebasan berekspresi menjadi capaian tertinggi dalam dimensi sipil dan politik (sipol).

“Nilai indeks HAM dari ekosob yang paling tinggi adalah hak atas pangan. Dari sipil dan politik yang paling tinggi adalah kebebasan berekspresi,” ujar Pigai.

Terpenuhinya hak atas pangan selaras dengan fokus Presiden Prabowo Subianto melalui program Makan Bergizi

HARI PERTAMA SEKOLAH: Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza UI Haq menjadi pembina upacara hari pertama semester di SMP Al-Irsyad Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin (5/1/2025).



BERBINCANG: Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono (kanan) berbincang dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini di Jakarta, Senin (5/1/2026). Keduanya membahas koordinasi penguatan tata kelola organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

INSTAGRAM SUGIONO_56

Satgas Kuala Dibentuk Pemulihan Pasca Bencana Di Aceh Tamiang Dikebut

Pemerintah mempercepat penanganan pascabencana di Aceh Tamiang. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memimpin langsung rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala untuk memastikan kesiapan normalisasi sungai dan pemulihan wilayah terdampak banjir secara terpadu.

RAPAT di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Minggu (4/1/2026) itu, digelar untuk memastikan kesiapan Satgas Kuala dalam pengerukan sungai, pemanfaatan sumber daya air, serta pemulihan wilayah terdampak bencana secara menyeluruh.

Dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, rapat koordinasi ini dihadiri Wakil Panglima TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Kepala Badan Logistik Pertahanan Ke-

menterian Pertahanan, Panglima Kodam Iskandar Muda, serta Bupati Aceh Tamiang. Rapat berlangsung di Kantor Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway.

“Rapat ini difokuskan pada sinkronisasi rencana teknis, kesiapan alat berat, dukungan logistik, serta integrasi program Satgas Kuala dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” ujar Sjafrie.

Rapat koordinasi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Men-

han ke Aceh Tamiang untuk men-rikan langsung kondisi Sungai dan Muara Tamiang.

Kunjungan ini juga dilakukan dalam rangka operasi terpadu Pemerintah guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak banjir serta pendangkalan sungai.

Dalam rapat itu, Sjafrie menegaskan, pengerahan alat berat oleh Satgas Kuala direncanakan dimulai dalam dua pekan ke depan. Dengan demikian, proses normalisasi sungai dan muara dapat berjalan selaras dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang tengah maupun akan dilaksanakan Pemerintah Daerah serta kementerian dan lembaga terkait.

Dia menekankan, pembentu-

kuan Satgas Kuala tidak semata-mata berorientasi pada penge-rukan dan normalisasi sungai. Satgas ini juga memiliki tujuan strategis yang lebih luas, yakni mendukung pemulihan dan penguatan perekonomian masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai dan kawasan Muara Tamiang.

Melalui normalisasi alur sun-gai, Pemerintah berharap, akses transportasi air dapat kembali pulih, aktivitas nelayan dan pertani-an berjalan normal, serta perda-ngangan lokal yang terdampak pendangkalan dan banjir dapat kembali bangkit.

Langkah ini mencerminkan komitmen Pemerintah meng-hadirkan solusi terpadu dan ber-kelanjutan melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat,

TNI, dan pemerintah daerah. Dengan pendekatan tersebut, penanganan pascabencana di-harapkan tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangkaian kunjung-an-nya, Sjafrie terlebih dahulu melakukan peninjauan udara menggunakan helikopter untuk memperoleh gambaran menye-luruh mengenai kondisi alur sungai, tingkat sedimentasi, dan kawasan muara.

Sjafrie juga meninjau langsung sepanjang sungai hingga Muara Tamiang menggunakan kapal guna memastikan kesiapan Lo-kasi, sekaligus memahami secara lebih rinci permasalahan teknis di lapangan. ■ SSL

Kemendes Gaet BSI Dukung Penguatan Ekonomi Ke Pelosok Desa

PEMERINTAH memperluas akses layanan keuangan hingga ke pelosok desa. Melalui Kement-erian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggandeng PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk untuk mendorong penguatan eko-nomi desa, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional berbasis dari bawah.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang penyediaan dan pemanfaatan produk serta layanan perbankan syariah. Penandatanganan di-lakukan di BSI Tower, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Dalam keterangan resminya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, kolaborasi dengan bank sya-riah milik negara itu bertujuan mendukung Asta Cita ke-6 Pre-siden Prabowo Subianto. Yakni

membangun dari desa dan dari bawah untuk mendorong per-tumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta pengentasan kemiskinan.

“*Insya Allah*, MoU ini bisa menambah kecerahan desa-desa di Indonesia,” ujar Yandri.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu men-jelaskan, saat ini banyak program Pemerintah berbasis desa. Di an-taranya, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, program-pro-gram tersebut akan berjalan lebih optimal jika masyarakat desa terlibat aktif dengan dukungan akses permodalan yang mudah, terjangkau dan dekat dengan aktivitas warga.

Selain memperluas akses pembiayaan, kehadiran layanan perbankan di desa juga diharap-kan dapat meningkatkan literasi



Yandri Susanto

keuangan masyarakat. Khusus-nya terkait pemahaman terhadap berbagai program pemerintah yang tengah dijalankan.

“Saya kira BSI harus hadir. Inilah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat desa terkait

literasi, mulai dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, Desa Wisata, dan program-program lainnya,” ucap Yandri.

Dikatakan, desa-desa di In-donesia sejatinya memiliki po-ten-si yang sangat besar. Namun, pengembangan potensi tersebut tidak dapat dilakukan Kemendes PDT seorang diri. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Mulai dari Pemerintah, pergu-ruan tinggi, peran aktif generasi muda, hingga industri keuangan.

Sejalan itu, Kemendes PDT terus memperkuat kolaborasi lin-tas sektor guna menjangkau selu-ruh desa di tanah air agar dapat diberdayakan secara maksimal. Hingga kini, Kemendes PDT telah menandatangani puluhan nota kesepahaman dengan ber-bagai pihak untuk mengoptimal-kan pembangunan desa.

“Kalau kita kepuang secara ber-sama-sama dengan komitmen yang kuat, saya meyakini Indo-

nesia Emas 2045 insya Allah bisa lebih cepat kita capai,” ujar Yandri.

Untuk menukseskan Asta Cita ke-6, Yandri juga telah mena-apkan 12 aksi prioritas Bangun Desa, Bangun Indonesia pada 2025 sebagai pedoman pemban-gunan desa.

Aksi tersebut antara lain, desa swasembada pangan, swasem-bada energi, swasembada air, desa ekspor, desa wisata, desa bebas narkoba, serta pemuda-pemudi pelopor desa.

Sebelumnya, Kemendes PDT juga menggandeng Bank Jateng untuk memfasilitasi layanan perbankan dalam mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Tengah.

Langkah tersebut merupak-an tindak lanjut dari semangat “Menggempur Desa” guna men-gentaskan kemiskinan melalui penguatan akses permodalan dan digitalisasi keuangan. ■ SSL

Wamen Fajar. Sekolah Harus Jadi Ruang Aman



WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza UI Haq menegaskan komitmen Peme-rintah membangun sekolah yang aman, inklusif dan menggem-birakan, sekaligus memperkuat literasi dan numerasi sebagai fondasi pembelajaran sejak hari pertama masuk sekolah.

Hal itu disampaikan Fajar saat menjadi pembina upacara hari pertama semester di SMP Al-Irsyad Kota Tegal, Senin (5/1/2026). Dia mengajak murid mengawali pembelajaran dengan semangat belajar, menghormati guru, serta berani membela teman sebaya sebagai bagian dari pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah.

“Sekolah harus menjadi ru-ang yang aman secara fisik dan psikologis. Murid tidak hanya belajar pengetahuan, tetapi juga

membangun karakter, kepedu-lian, dan keberanian untuk men-cegah kekerasan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, alumni Universitas Muhamma-diyah Surakarta (UMS) itu juga menjelaskan kebijakan Tes Ke-mampuan Akademik (TKA) yang mulai diberlakukan pada 2026 untuk jenjang SD dan SMP. TKA mencakup Matematika dan Bahasa Indonesia, tidak menen-tukan kelulusan, dan berfungsi sebagai pemetaan kemampuan akademik murid.

“Tidak perlu takut dan panik. TKA bukan penentu kelulusan, melainkan peta kemampuan mu-rid yang juga bisa dimanfaatkan sebagai jalur prestasi,” katanya.

Selain menghadiri upacara, Fa-jar bersama Wali Kota Tegal, Sek-retaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan meninjau pemanfaatan

Interactive Flat Panel (IFP) di SLB Negeri Kota Tegal. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan dukungan sarana pembelajaran digital bagi pendidikan inklusif.

Menurut Fajar, teknologi pem-belajaran seperti IFP penting untuk menghadirkan pembelajaran yang adaptif dan interaktif bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

“Transformasi digital harus men-jangkau semua anak. Teknologi membantu guru menyampaikan materi secara lebih visual dan sesuai kebutuhan murid,” ujarnya.

Penguatan literasi, numerasi dan pendidikan inklusif sejalan dengan kebijakan nasional Ke-mendikdasmen.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, kata Fajar, menekankan bahwa mutu pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi

juga dari lingkungan belajar yang aman, inklusif dan beradab.

Berdasarkan Rapor Pendi-dikan Indonesia 2025, capaian literasi dan numerasi murid SD dan SMP di Kota Tegal berada pada kategori baik, dengan tren peningkatan pada jenjang SMP.

Indeks Standar Pelayanan Mini-mal (SPM) Pendidikan Kota Tegal juga mencapai 81,68 atau kategori Tuntas Madya. Iklim keamanan dan inklusivitas sekolah tercatat baik di hampir seluruh jenjang, termasuk pendidikan khusus.

Sehari sebelumnya, Minggu (4/1/2026), Fajar menghadiri Haflah XI Khatmil Qur’an, Ra-jabiyah dan Haul Para Seseputh di Pondok Pesantren Kauman Lasem, Jawa Tengah. Anggota Badan Pembina Harian Univer-sitas Muhammadiyah Sukabumi itu menekankan pentingnya ilmu

sebagai fondasi amal saleh dengan mengutip Surah Fatir ayat 29.

“Didahulukannya tilawah menunjukkan bahwa ilmu adalah fondasi dari segala amal kebai-kan,” ujarnya.

Fajar juga menyoroti hasil riset Kementerian Agama yang menunjukkan 57 persen masyara-kat rutin membaca kitab suci, tetapi hanya 37 persen mema-hami maknanya, dan kurang dari 25 persen mengaitkannya dengan praktik kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, tantangan dunia pendidikan, termasuk pesantren, adalah menjembatani kesalehan individual dan kesalehan sosial.

Kegiatan haflah tersebut dihad-iri, antara lain Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, KH Muhammad Zaim Ahmad Ma’shum, Gus Yusuf Chudhori dan KH Zulfa Mustofa. ■ ASI

Gerbang Nusantara

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Wali Kota Tasikmalaya

Motivasi Aparatur
Tingkatkan Kinerja



WALi Kota Tasikmalaya, Vi-man Alfarizi Ramadhan me-minta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerin-tah Kota (Pemkot) Tasikmalaya menjadikan tahun 2026, sebagai tahun peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Dia mendorong, seluruh ASN di Tasikmalaya bekerja lebih efektif dalam hal pelayanan publik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penegasan itu disampai-kan Viman, saat memimpin Apel Pagi Gabungan di hala-man Balai Kota Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), Senin (5/1/2026). Apel tersebut me-jadi agenda pembukaan kerja Pemerintah sekaligus konsoli-dasi internal birokrasi.

"Awali tahun 2026 dengan semangat baru, komitmen yang kuat, dan tanggung jawab be-sama untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi ma-syarakat. Awal tahun tak boleh sekadar menjadi rutinitas se-remonial, seluruh ASN harus menjadikan 2026 sebagai mo-mentum perubahan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada publik," tegas Viman.

Apel gabungan itu juga dirangkaikan dengan penye-

rahan Keputusan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pem-berhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai Januari 2026. Pemerintah memberikan peng-hargaan kepada ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdian.

Selain itu, diserahkan pula Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Pangkat ASN pe-riode 1 Januari 2026. Kenaikan pangkat diberikan kepada ASN yang dinilai memenuhi syarat kinerja dan dedikasi selama menjalankan tugas.

Lebih lanjut, Viman menekankan, profesionalisme dan kolaborasi antarperangkat daerah merupakan kunci untuk memperbaiki kualitas birokrasi. Dia mengingatkan, ASN tak bo-leh bekerja secara sektoral dan menghindari pola kerja lamban.

Politisi Partai Gerindra itu juga menyinggung pentingnya disiplin dan integritas aparatur. Sebab, kata dia, kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) sangat diten-tukan oleh perilaku dan kinerja ASN di lapangan.

"Karena,nya, manfaat pelayanan publik harus dirasakan langsung oleh masyarakat," cetusnya.

Selain aspek kinerja, Vi-man juga mengingatkan para ASN untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Dia men-dorong penerapan pola hidup sehat sebagai bagian dari bu-daya kerja yang produktif dan berkelanjutan.

"Saya mengapresiasi kinerja ASN sepanjang 2025. Sejum-lah capaian berhasil diarahi Pemkot Tasikmalaya, termasuk Opini Wajar Tanpa Pengec-uialian (WTP) atas laporan keuangan daerah. Kita juga meraih predikat Kota Sehat, serta berbagai penghargaan lain di tingkat regional dan na-sional," imbuhnya. ■ KAL

Optimis Bangkit & Menang
PPP Jabar Perkuat
Tekad Ke Senayan

DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelar ta-syukuran Hari Lahir (Harlah) PPP ke-53 di Kantor DPW PPP Jabar di Bandung, Ming-gu (4/1/2025). Kegiatan itu juga diisi dengan doa bersama, sebagai bentuk rasa syukur sekaligus refleksi perjalanan Partai Ka'bah.

Pelaksana Tugas (Plt) Ke-tua DPW PPP Jabar, Pepep Saepul Hidayat menyatakan, peringatan Harlah PPP, yang jatuh pada 5 Januari, sengaja dikemas secara sederhana dan khidmat dengan melibatkan cabang-cabang terdekat. Pa-salnya, peringatan Harlah PPP tahun ini bersamaan dengan terjadinya musibah yang me-nimpa saudara sebangsa di sejumlah daerah.

"Alhamdulillah, kami melaksanakan Miling Mila-ngkala ke-53 Partai Persatuan Pembangunan. Kami mengun-dang beberapa cabang terdekat untuk doa bersama, sekaligus mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang di-uji dengan berbagai bencana alam," ujarnya di Bandung, Jabar, Minggu (4/1/2025).

Selain menjadi momentum spiritual, lanjut Pepep, Harlah PPP ke-53 juga menjadi ru-ang konsolidasi internal partai. Menurut dia, DPW PPP Jabar telah menuntaskan sejumlah program strategis penguatan kader di seluruh kabupaten/kota.

Salah satunya, urai dia, Latih-an Kader Kepemimpinan Dasar (LKKD) yang digelar di 27 kabupaten/kota dengan kepe-rsertaan berbasis kecamatan. "Program ini untuk menyiap-kan struktur partai ke depan. Se-tiap kecamatan diwakili empat peserta, sehingga kita memiliki stok kader yang siap ketika terjadi pergantian struktur di tingkat kecamatan," jelasnya.

Pepep menambahkan, ka-derisasi yang dilakukan DPW PPP Jabar juga tak hanya

fokus pada kader laki-laki. Dia memastikan, pihaknya juga menggarap penguatan kader perempuan secara serius, melalui pelatihan yang digelar oleh Wanita Persatuan Pem-bangunan (WPP) Jabar, yang melibatkan mahasiswa dan aktivis perempuan.

"Kemarin, satu angkatan berjumlah 200 orang. Ka-mi ingin amanat 30 persen keterwakilan perempuan tak sekadar jadi formalitas, tapi benar-benar diiringi dengan penguatan isu dan keperca-yaan diri kader perempuan," tegasnya.

Lebih lanjut, Pepep me-ngatakan, DPW PPP Jabar juga menginisiasi Madrasah Kader Partai, sebagai upaya memperluas basis dukungan. Menurut dia, program terse-but menyasar pemilih pemula dan masyarakat yang tertarik pada figur kader PPP, meski sebelumnya tidak memiliki kedekatan dengan partai.

Dia juga menyampaikan arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP soal konsolidasi or-ganisasi jelang verifikasi faktual Pemilu 2029. Sebab, Provinsi Jabar memiliki jumlah pen-duduknya besar dan tantangan yang cukup kompleks.

"Kami menyadari, saat ini PPP terlempar dari Senayan. Makanya, konsolidasi orga-nisasi menjadi prioritas utama. Verifikasi faktual bukan peker-jaan mudah," tegasnya.

Namun begitu, dia optimis, DPW PPP Jabar bisa bangkit dan memenangkan Pemilu mendatang. Pihaknya menar-getkan meraih 12 kursi DPR, dengan catatan konsolidasi dan kaderisasi berjalan solid.

"Kalau struktur sudah ter-bentuk dan kaderisasi berjal-an berjenjang, saya kira 12 kursi bukan hal yang sulit. Ujiannya sekarang, verifi-kasi faktual dan Jawa Barat sangat menentukan secara nasional," tandasnya. ■ **OSP**



ANTARA FOTO/Anis Eftzudin/nz

Pimpin Rapat Pleno Golkar Sumut

Doli Rombak Jajaran DPD

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat pleno untuk menetapkan arah konsolidasi organisasi, sekaligus persiapan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sumut. Rapat yang dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia Tandjung itu, juga memutuskan penyesuaian struktur kepengurusan DPD Golkar Sumut.

BERDASARKAN pantauan *Rakyat Merdeka*, komposisi kepengurusan yang mengikuti rapat merupakan hasil revitalisasi organisasi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, melalui Surat Keputusan (SK) tertanggal 24 Desember 2025. Ha-dir dalam rapat, Sekretaris DPD Golkar Sumut, Rolel Harahap; Bendahara, Victor Silaen; Ketua Harian, HA Yasyir Ridho Loebis; serta sejumlah wakil ketua bidang dan pengurus lainnya.

Revitalisasi tersebut dilaku-kan pasca penunjukan Ahmad Doli Kurnia Tandjung, meng-gantikan Ketua DPD Golkar Su-mut Musa Rajekshah alias Ijeck. Rapat tersebut berlangsung di Kantor DPD Golkar Sumut, Ja-lan KH Wahid Hasyim, Medan, Senin (5/1/2026).

Dalam keterangannya kepada wartawan, Doli menjelaskan, Rapat Pleno difokuskan pada evaluasi organisasi, penguatan konsolidasi internal, serta per-siapan agenda strategis partai. Utamanya, pelaksanaan Musda Golkar Sumut, yang menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan di tingkat daerah.

"Peserta rapat pleno me-mberi mandat kepada saya untuk berkonsultasi langsung dengan Ketua Umum DPP Partai Gol-kar, terkait jadwal pelaksanaan Musda dan pembentukan kepa-nitiaan Musda Golkar Sumatera Utara," ujar Doli.

Wakil Ketua Umum DPP Golkar itu menegaskan, penentuan jadwal Musda harus mempertimbangkan

ada dan tidak membuang siapa pun. Kami hanya melakukan pe-nyesuaian agar organisasi lebih efektif dan solid," tegasnya.

Saat ini, tambah Doli, kepe-ngurusan Golkar Sumut tercatat berjumlah sekitar 230 orang de-ngan latar belakang kader yang beragam. Menurutnya, susunan tersebut dirancang untuk merang-kul seluruh potensi kader Golkar di Provinsi Sumut, sekaligus me-mastikan roda organisasi berjalan optimal hingga Musda terlaksana.

Doli menambahkan, pihaknya segera menyampaikan hasil rapat pleno kepada DPP Golkar. Dia berharap, seluruh tahapan Musda Golkar Sumut berjalan sesuai me-kanisme organisasi, menjunjung tinggi prinsip demokrasi, serta menjaga soliditas internal partai.

"Musda adalah forum tertinggi di daerah. Kami ingin seluruh proses berjalan tertib, demokratis, dan se-suai aturan partai," tandasnya.

Sebelumnya, Dewan Pertim-bangan (Wantim) Golkar Sumut menyatakan menolak ke-pemimpinan Doli Kurnia. Wantim mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar mencabut Surat Keputusan (SK) pengang-katan Plt Ketua dan mengem-balikan jabatan Ketua Golkar Sumut kepada Ijeck.

Pernyataan sikap itu tertuang dalam surat Wantim Golkar Su-mut, tertanggal 2 Januari 2026, yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Golkar. Surat itu ditandatangani Ketua Wantim Golkar Sumut, Muhyun Tam-buse, dan Wakil Sekretaris, Sanggam S Bakara.

Muhyun Tambuse menjelas-kan, surat tersebut merupakan hasil rapat resmi Wantim yang digelar, pada 29 Desember 2025. Menurutnya, pengangkatan Doli Kurnia sebagai Plt Ketua telah menimbulkan kegaduhan dan gejolak di internal partai.

Dalam surat itu, lanjut dia, Wan-

"Peserta rapat pleno memberi mandat kepada saya untuk berkonsultasi langsung dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, terkait jadwal pelaksanaan Musda dan pembentukan kepanitiaan Musda Golkar Sumatera Utara."

AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
Ketua DPD Golkar Sumut



tim menilai Doli Kurnia kerap mengeluarkan pernyataan yang dianggap kontraproduktif serta mendiskreditkan kepemimpinan Ijeck, termasuk tudingan bahwa kepengurusan Golkar Sumut di bawah Ijeck tidak mengakomo-dasi seluruh kader.

"Wantim tidak menemukan adanya kesalahan, kelalaian, maupun pelanggaran AD/ART yang dilakukan Ijeck selama menjabat Ketua DPD Golkar Su-mut. Sebab itu, Wantim menilai, tidak ada alasan kuat bagi DPP untuk memberhentikan Ijeck dari jabatannya," tegasnya.

Sebaliknya, sambung dia, Wantim justru menyoroti se-jumlah capaian politik Golkar Sumut di bawah kepemimpinan Ijeck. Di antaranya, keberhasilan memenangkan Pilkada serentak dengan perolehan suara menca-pai 64 persen, melampaui target DPP sebesar 60 persen. Selain itu, pada Pemilu Legislatif 2024, Golkar Sumut tampil sebagai pemenang dengan peningkatan signifikan jumlah kursi di selu-ruh tingkatan legislatif.

"Terkait berakhirnya masa kepengurusan Golkar Sumut periode 2020–2025, Wantim

menjelaskan, DPD Golkar Su-mut telah dua kali menyurati DPP untuk meminta persetujuan pelaksanaan Musda, masing-ma-sing pada 29 April 2025 dan 13 September 2025. Namun, hingga kini tidak ada tanggapan dari DPP Partai Golkar," terang-nya.

Sebagai informasi, perseter-uan politik di tubuh Golkar Su-mut, terjadi lantaran penunjukan Ahmad Doli, sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut. Sekretaris DPD Golkar Sumut, Ilhamsyah, merespon keputusan itu dengan pengunduran diri.

Penunjukan Doli tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP Golkar Nomor: Skep-132/DPP/ GOLKAR/XII/2025. Surat itu di-tandatangani Ketua Umum Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Muhammad Sarmuji, di Jakarta, pada 14 Desember 2025.

Dalam surat tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Golkar itu ditugaskan memimpin transisi Golkar di Sumut, mengganti-kan Ijeck hingga terlaksananya Musda XI Golkar Sumut. Fokus utamanya, menjaga stabilitas dan memastikan roda organisasi tetap berjalan pasca pergantian kepemimpinan. ■ KAL

Laporkan Mantan Ketua DPC Ke Kejati Jatim

PDI Perjuangan Pasuruan Bergejolak

GEJOLAK internal melanda PDI Perjuangan Kabupaten Pasuru-an. Sejumlah kader melaporkan mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan periode 2021-2025 berinisial AW ke aparat penegak hukum, atas dugaan penyelewengan atau korupsi dana bantuan politik (banpol).

Sejumlah pengurus Pimpin-an Anak Cabang (PAC), atau pengurus tingkat kecamatan PDI Perjuangan di Kabupaten Pasuruan melaporkan AW ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Senin (5/1/2026). Dalam laporan itu, AW diduga melakukan penyimpangan dan penggelapan dana banpol selama masa kepemimpinannya.

Ketua Ketua Umum DPP Perjuangan Kecamatan Lekok, Aseh me-ngatakan, laporan terhadap AW berangkat dari temuan keja-ngalan dalam laporan pertang-gungjawaban (LPJ) penggunaan dana banpol pengurus DPC

PDI Perjuangan Pasuruan periode 2021-2025. Utamanya, soal kegiatan pendidikan politik yang tercantum dalam dokumen.

"Kami melaporkan saudara AW menggelapkan dana banpol tahun 2022 senilai Rp 600 juta. Tiap tahun, dana banpol terus me-ningkat hingga mencapai Rp1,3 miliar," ujarnya di Kejati Jatim, Surabaya, Senin (5/1/2026).

Aseh menegaskan, para pe-ngurus PAC di Kabupaten Pa-suruan tidak pernah merasakan maupun mengetahui adanya kegiatan pendidikan politik se-bagaimana tercantum dalam LPJ tersebut. Selain itu, pihaknya menduga adanya pemalsuan tan-da tangan para pengurus PAC.

"Dalam LPJ, seolah-olah ada kegiatan pendidikan politik. Fak-tanya, itu tidak pernah ada. Tanda tangan kami, para pengurus PAC diduga dipalsukan," tegasnya.

Dugaan tersebut, lanjut Aseh, diperkuat dengan pengakuan bendahara DPC PDI Perjuang-

an Kabupaten Pasuruan, yang mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penggunaan maupun pen-cairan dana banpol.

"Fakta tersebut memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi. Kami berharap, parat penegak hukum memproses yang bersangkutan sesuai hu-kum yang berlaku," cetusnya.

Senada, Ketua PAC PDI Per-juangan Kecamatan Pandaan, Harsilah menyebut, LPJ DPC PDI Perjuangan Pasuruan yang setiap tahun disampaikan ke Badan Ke-satuan Bangsa dan Politik (Bakes-bangpol) Kabupaten Pasuruan terdapat banyak kejanggalan. Di antaranya, urai dia, pemalsuan tanda tangan pengurus DPC, PAC, hingga ranting, atau pengurus tingkat kelurahan dan desa.

"Ada kegiatan yang mencan-tumkan nama dan tanda tangan saya. Padahal, saya tidak pernah menandatangani. Ini juga diala-mi rekan PAC lainnya. Diduga ada manipulasi kegiatan fiktif,"

ujar Harsilah.

Atas temuan itu, sambung dia, para pengurus PAC mendesak Kejati Jatim segera mengusut tuntas dugaan korupsi dana banpol yang diduga melibatkan mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Pasuruan.

Harsilah mengatakan, laporan ke Kejati Jatim melengkapi laporan yang dilakukan sebelu-mnya, Senin (15/12/2025). Saat itu, sebanyak 23 PAC PDI Perjuang-an Kabupaten Pasuruan me-tahan disampaikan ke Badan Ke-satuan Bangsa dan Politik (Bakes-bangpol) Kabupaten Pasuruan terdapat banyak kejanggalan. Di antaranya, urai dia, pemalsuan tanda tangan pengurus DPC, PAC, hingga ranting, atau pengurus tingkat kelurahan dan desa.

"Ada kegiatan yang mencan-tumkan nama dan tanda tangan saya. Padahal, saya tidak pernah menandatangani. Ini juga diala-mi rekan PAC lainnya. Diduga ada manipulasi kegiatan fiktif,"

Berdasarkan ketentuan, tam-bah Harsilah, dana banpol harus dialokasikan 60 persen untuk pendidikan politik, dan 40 persen untuk operasional sekretariat. "Namun, para pengurus PAC tidak pernah merasakan adanya kegiatan pendidikan politik se-bagaimana dilaporkan," ucapnya.

Sementara, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Wonore-jo, Wito menyatakan, pihaknya hanya mengetahui dana banpol sebatas administrasi. "Di LPJ, ke-giatan ditulis seolah-olah berjalan normal, bahkan ada tanda tangan kami. Padahal, kami tidak pernah menandatangani," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejari Pasuruan, Ferry Hari Ardi-anto mengatakan, pihaknya telah menerima laporan para pengurus PAC PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan. "Setiap laporan yang kami terima akan kami pelajari terlebih dahulu, sebelum menen-tukan langkah hukum selanjut-nya," ujarnya. ■ KAL



Rayakan Harlah Ke-53 Di Aceh

Mardiono Ajak Para Kader PPP Utamakan Persatuan



Muhammad Mardiono

KETUA Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono mengajak seluruh kadernya untuk menjaga persatuan. Dia mengatakan, tidak ada organisasi besar tanpa persatuan. Kata dia, perbedaan cara pandang dalam organisasi merupakan hal yang wajar. “Untuk merawat persatuan tidak cukup hanya dengan retorika,” kata Mardiono saat merayakan Hari Lahir (Harlah) PPP di Kabupaten Bireuen, Aceh, Senin (5/1/2025).

Mardiono menegaskan, persatuan harus diwujudkan melalui ketaatan, kedisiplinan, serta kesediaan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Termasuk juga, kata dia, diperlukan kepemimpinan yang didukung oleh semua pihak.

“Sebagaimana Islam telah memberikan pedoman yang jelas untuk taat kepada pemimpin,” tegasnya.

Persatuan, tegas Mardiono, bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar bagi sebuah bangsa, termasuk Indonesia. Dia menilai, keberagaman suku, agama, dan budaya hanya akan menjadi kekuatan jika dibingkai dalam persatuan dan kesatuan.

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini juga menyoroti kondisi geopolitik dunia yang dinilainya tengah tidak baik-baik saja. Dia mencatat, setidaknya terdapat 114 kon-

flik di berbagai belahan dunia, baik konflik bersenjata, perang saudara, maupun ketegangan geopolitik yang berkepanjangan.

“Konflik-konflik tersebut memberikan pelajaran penting bahwa perpecahan, kebencian, dan hilangnya persatuan selalu berujung pada penderitaan rakyat, kehancuran peradaban, serta hilangnya masa depan generasi bangsa,” tuturnya.

Mardiono berharap, persatuan dan kesatuan dapat menjadi benteng penjaga Indonesia agar tidak terjerumus ke dalam konflik seperti yang dialami negara lain. Persatuan juga, kata dia, dapat diwujudkan melalui sikap saling membantu daerah yang tertimpa musibah, seperti bencana banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

“Persatuan bukan lagi pilihan, melainkan telah menjadi kebutuhan mendasar bagi sebuah bangsa, termasuk Indonesia,” ujarnya.

Di Aceh, sebagai langkah awal, PPP menurunkan 200 relawan untuk membantu proses pembersihan pascabencana di Kabupaten Bireuen. Para relawan tersebut, kata Mardiono, akan bertugas secara bergantian bersama relawan lainnya.

Selain mengerahkan relawan, Mardiono juga menyerahkan bantuan bahan pangan. Antara lain beras, susu, mi instan, dan air mineral. Dia turut turun langsung mengunjungi warga terdampak serta menemui para pengungsi korban banjir.

“Saya meminta seluruh kader PPP untuk membantu meringankan beban warga terdampak bencana. PPP terus mendorong percepatan pemulihan dengan menyediakan relawan, bantuan pangan, hingga dukungan alat berat,” jelasnya.

Diketahui, rangkaian peringatan Harlah PPP diawali dengan doa dan zikir bersama bagi para korban bencana alam di Pulau Sumatera. Pemilihan Aceh sebagai lokasi peringatan dinilai relevan, mengingat daerah tersebut merupakan salah satu wilayah yang terdampak banjir dan longsor. ■ BSH

Konflik-konflik tersebut memberikan pelajaran penting bahwa perpecahan, kebencian, dan hilangnya persatuan selalu berujung pada penderitaan rakyat, kehancuran peradaban, serta hilangnya masa depan generasi bangsa.

Sampaikan Pesan Presiden Prabowo

Gerindra Senayan Wajib Menyerap Aspirasi Rakyat



Endro Hermono

POLITIKUS Partai Gerindra, Endro Hermono mengatakan seluruh kader partai berlabang Kepala Garuda yang duduk di DPR wajib menyerap aspirasi masyarakat di akar rumput serta menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, aspirasi tersebut nantinya akan diperjuangkan di tingkat legislatif. “Kami dari Partai Gerindra memiliki kewajiban untuk mendengar langsung suara rakyat,” kata Endro dikutip dari situs Partai Gerindra, Senin (5/1/2026).

Endro mengungkapkan, salah satu upaya penyerapan aspirasi adalah melalui kegiatan sosialisasi penyerapan aspirasi bersama masyarakat di Blitar, Jawa Timur, Minggu (4/1/2026). Kegiatan tersebut, kata dia, merupakan bagian dari komitmen Partai Gerindra untuk terus hadir di tengah masyarakat dan mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung.

“Aspirasi tersebut kemudian dikonversi menjadi bahan

perjuangan Partai Gerindra di parlemen,” jelas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Jawa Timur itu.

Selain menyerap aspirasi, Endro juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Presiden, kata dia, selalu mengajak masyarakat untuk tetap optimistis, bergembira, dan berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

“Idengan mental yang kuat, kita bisa bersama-sama membangun bangsa dan daerah agar semakin maju,” tegasnya.

Endro menambahkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Khususnya, kata dia, di sektor ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

“Oleh karena itu, dukungan serta partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar program-program tersebut dapat berjalan secara optimal,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Gerindra, Mujib menekankan pentingnya sinergi antara wakil rakyat di tingkat Pusat dan Daerah guna mempercepat pembangunan. Dia berharap, aspirasi masyarakat Kecamatan Kademangan dapat segera ditindaklanjuti.

“Kami siap mengawal aspirasi masyarakat Kabupaten Blitar agar tersampaikan dengan baik dan mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” kata Mujib. ■ BSH



BELAJAR DI TENDA: Sejumlah siswa mengikuti kegiatan belajar pada hari pertama sekolah di bawah tenda, di SDN 05 Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (5/1/2026). Sekolah yang hancur akibat banjir bandang bulan lalu itu tetap menjalankan kegiatan belajar-mengajar di bawah tenda bantuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk dua kelas, ditambah bangunan kayu sementara untuk empat kelas.

ANTARA FOTOIGGOY EL FITRAIYU

Polemik Sistem Pilkada

Golkar: Pilkada Tak Langsung Wujud Demokrasi Pancasila

Partai Golkar menilai usulan Pilkada tidak langsung merupakan implementasi demokrasi Pancasila. Di dalamnya, terkandung semangat musyawarah, perwakilan, serta orientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.

“SELAMA dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bermoral, mekanisme tersebut justru mencerminkan demokrasi perwakilan yang berakar pada Pancasila,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham di Jakarta, Senin (5/1/2025).

Idrus menjelaskan, Pilkada tidak langsung atau melalui perwakilan partai di DPRD, berpotensi melahirkan kepemimpinan daerah yang lebih rasional, stabil, dan berbasis kapasitas. Selain itu, kata dia, mekanisme ini dapat mengurangi polarisasi sosial serta praktik politik uang yang kerap menyertai Pilkada langsung.

“Demokrasi dalam konteks ini bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan instrumen ideologis untuk menjaga persatuan dan keberlanjutan bangsa,” katanya. Menurut Idrus, persoalan teknis pemilihan kepala daerah, apakah dipilih langsung atau melalui perwakilan di parlemen, harus terlebih dahulu diuji kesesuaiannya dengan ideologi

dan falsafah bangsa, bukan semata dilihat dari aspek teknis atau pragmatis.

Karena itu, Idrus menilai, perdebatan publik selama ini kurang tepat dan tidak mendasar. Sebab, kata dia, perdebatan itu terlalu cepat terjebak pada dikotomi Pilkada langsung dan tidak langsung tanpa meletakkan fondasi ideologisnya.

“Padahal, demokrasi Indonesia sejak awal tidak dirancang sebagai demokrasi liberal elektoral, melainkan demokrasi Pancasila yang bertumpu pada permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan,” tegasnya.

Idrus yakin, Pilkada tidak langsung tidak menyalahi aturan main demokrasi di Indonesia. Secara regulasi, merujuk Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, tidak ada penguncian demokrasi pada satu model teknis tertentu. Kata dia, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa kepala daerah “dipilih secara demokratis”.

‘Frasa ini sengaja dirumuskan



Idrus Marham

secara terbuka agar selaras dengan karakter demokrasi Pancasila, bukan sekadar meniru model demokrasi liberal elektoral,” ujarnya.

Idrus menambahkan, musyawarah dan perwakilan merupakan ciri khas demokrasi Indonesia. Demokrasi, kata dia, tidak semata diukur dari seberapa langsung proses pemilihan dilakukan, melainkan dari sejauh mana keputusan politik lahir melalui pertimbangan rasional, kebijaksanaan, dan kepentingan bersama.

Oleh karena itu, lanjut Idrus, mengembalikan mekanisme pemilihan tidak langsung, bukan soal pragmatisme kekuasaan,

melainkan menyangkut ideologi negara dan falsafah bangsa. Yakni, bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan melalui permusyawaratan dan perwakilan sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa.

Idrus menambahkan, jika masalahnya ada pada perilaku elite yang transaksional, maka solusinya adalah konsolidasi ideologi, pembenahan etika, penegakan hukum, dan penguatan institusi politik. Bukan mempersempit demokrasi atau menghindari perdebatan ideologis.

“Perubahan mekanisme tersebut harus disertai penguatan partai politik dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro mengusulkan Pilkada menggunakan mekanisme asimetris. Yaitu, setiap daerah dapat menentukan sendiri cara memilih pemimpinnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Dengan mekanisme tersebut, sejumlah daerah bisa menerapkan Pilkada langsung, sementara daerah lain memilih skema tidak langsung. Ini saya sampaikan setelah melakukan riset di sejumlah daerah dengan karakter

teristik dan tingkat demokrasi yang berbeda,” tutur Siti Zuhro di Jakarta, Senin (5/1/2025)..

Prof Zuhro mengakui, terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan Pilkada langsung. Meski demikian, dia menilai, kelebihan utama Pilkada langsung terletak pada tingginya partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin.

“Dengan begitu, rakyat memiliki kedaulatannya, haknya, termasuk hak politik. Itu kelebihan Pilkada langsung,” katanya.

Adapun kekurangannya, menurut Siti Zuhro, Pilkada langsung membutuhkan biaya yang sangat besar. Kata dia, utuk dicalonkan, mahalnya luar biasa. Apalagi, lanjut dia, untuk bisa menang, biaya kampanyenya juga sangat besar.

“Akhimya ini menjadi kontestasi pemodal. Karena itu muncul istilah investor Pilkada,” ujarnya.

Diketahui, wacana Pilkada tidak langsung kembali mencuat setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada acara puncak peringatan HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menilai Pilkada langsung menguras anggaran negara dan dinilai kurang efisien. ■ OSP

Trending Topics

Mensesneg Minta Mendagri Lakukan Monitoring

Korban Bencana Gratis Urus Dokumen Kependudukan

PEMERINTAH menggratiskan pengurusan dokumen kependudukan bagi korban bencana alam di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumut). Kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen akibat bencana banjir dan tanah longsor.

“Berkenaan dengan pengurusan kembali seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat, memang diminta untuk tidak dipungut biaya,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Jakarta, Senin (29/12/2025). Selain menekankan layanan gratis, Prasetyo juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan monitoring dan pengawasan ketat agar tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi bencana untuk mencari keuntungan pribadi.

“Kami mohon diberikan catatan, Pak Mendagri, untuk dilakukan monitoring dan pengawasan supaya di dalam pelaksanaannya tidak ada oknum-oknum di lapangan yang memanfaatkan situasi,” pesannya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, sejak 15 November pihaknya sudah membentuk sembilan tim untuk mendata dan membantu dukcapil di daerah terdampak. Dari 52 kabupaten/kota yang terdampak, hanya tiga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil) yang

benar-benar tidak berjalan. “Yaitu, Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa,” katanya.

Menurut Tito, sebagian besar layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di wilayah terdampak sudah kembali beroperasi normal. Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kondisi pelayanan relatif baik dan peralatan tidak mengalami kerusakan berarti.

Kemendagri juga telah memproduksi 63.230 dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana. Dokumen tersebut meliputi Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen penting lainnya.

“Semua ini tidak bayar. Kami akan terus bekerja membantu masyarakat yang kehilangan dokumen agar kembali memiliki data kependudukan mereka, dan sekali lagi tidak dipungut bayaran,” ujar Tito.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR, Cindy Monica berkomitmen mengawal instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera.

“Instruksi Presiden Prabowo sangat jelas. Pengurusan dokumen kependudukan bagi korban bencana harus digratiskan dan tidak boleh dipungut biaya apapun. Negara harus hadir penuh, bukan justru menambah beban rakyat yang sedang kehilangan,” katanya di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Politisi Partai NasDem itu memastikan, akan melakukan pengawasan ketat terhadap pe-



Prasetyo Hadi

laksanaan kebijakan tersebut di lapangan, khususnya pada layanan Dukcapil di daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera. Dia bersama anggota DPR lainnya akan terus mengawal kebijakan ini agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke tingkat paling bawah. “Jangan main-main dengan penderitaan rakyat. Jika masih ada pungutan, itu berarti mengkhianati instruksi Presiden dan rasa keadilan,” tandasnya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolorindo), Yohanes Oci mengatakan, berbagai kebijakan yang diterbitkan Mendagri telah menjawab kebutuhan mendesak daerah terdampak, baik dari sisi fleksibilitas anggaran, keberlanjutan pelayanan publik, hingga pemulihan tata kelola pemerintahan desa.

“Mendagri juga mengeluarkan kebijakan percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) serta dokumen pemerintahan lainnya.

Meski demikian, Yohanes mengingatkan, efektivitas sepaket

kebijakan Mendagri tersebut sangat tergantung pada kesiapan dan akselerasi Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, Pemda tidak boleh bersikap pasif meskipun wilayahnya menjadi prioritas perhatian Pemerintah Pusat.

“Jika Pemda mampu berkoordinasi secara baik dengan Pemerintah Pusat, maka kebijakan Kemendagri ini akan sangat efektif dalam mempercepat pemulihan pemerintahan desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat,” katanya.

Di media sosial X, warganet meminta agar Pemerintah mengawasi pengurusan dokumen kependudukan bagi korban bencana di Sumatera. Dalam praktiknya, banyak celah pungli yang kerap disalahgunakan untuk oknum tidak bertanggung jawab.

Akun @Mudiinn menuturkan, banyak korban banjir yang belum sempat mengurus dokumen kependudukannya yang hilang. “Jadi Pemerintah tolong berinovasi dan usahakan agar proses administrasi korban bencana dapat dipermudah. Jangan kaku asal minta fotocopy KTP KK dan sebagainya untuk mengakses bantuan dan fasilitas, banyak korban banjir masih berduka dan trauma,” katanya.

Akun @RasheedAli54860 mengingatkan, jangan sampai korban banjir diminta KTP dan KK jika akan diberikan bantuan. “Dokumen administrasi kependudukan para korban banyak yang hilang, rumahnya saja hanyut terbawa derasnya arus banjir. Makanya apa-apa jangan ditanyain KTP dan KK korban, atau disuruh buru-buru mengurusnya, ini buat kebutuhan sehari-hari saja korban masih

kesulitan,” sebutnya.

Akun @yswandi menambahkan, kerusakan akibat banjir juga menyasar kantor-kantor pemerintahan. “Pengurusan dokumen kependudukan seharusnya dilakukan dengan sistem jemput bola, yang terpenting data kependudukan di tingkat daerah tidak sampai hilang,” ujarnya.

Senada, @babebinong mengungkapkan, korban banjir juga kebingungan jika hendak mengurus dokumen kependudukan. “Banyak korban banjir KTP-nya hilang, KK juga hanyut. Lalu mereka diminta untuk buat KTP baru ke kantor desa, tapi kantornya juga rusak terkena banjir, bingung kan, makanya mesti ada layanan pembuatan KTP darurat,” sarannya.

Akun @sephhendrikus menerangkan, di era KTP digital seharusnya semua proses pencetakan KTP baru lebih mudah dan cepat. “Kan sudah digitalisasi, harusnya korban banjir cukup sebut nama lengkap mereka, tempat dan tanggal lahir, terus petugas cek di website, keluar deh data KTP dan KK. Kalo apa-apa mesti bawa kartu fisik apa bedanya kayak puluhan tahun yang lalu,” sentinya.

Akun @bronispait meminta agar jangan KTP dan KK korban banjir saja yang pencetakan ulangannya dipermudah. “Kalau kehilangan KTP kan bisa dibuatkan lagi di Disdukcapil, bisa ditunggu langsung jadi, Pemerintah juga bilang semuanya gratis. Tapi bagaimana kalau SIM dan STNK, banyak korban banjir yang kehilangan kedua dokumen ini, seharusnya bisa dicetak lagi secara gratis,” harapnya. ■ OSP

Pulihkan Wilayah Terisolasi Di Sumatera Mandiri & Kemenhan Sinergi Bangun Lima Jembatan Tipe Bailey

BANK Mandiri berkolaborasi dengan Kementerian (Kemenhan) membangun lima jembatan bertipe Bailey.

Pembangunan ini untuk membantu pemulihan konektivitas wilayah yang terisolir akibat bencana banjir dan tanah longsor Sumatera.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyatakan, inisiatif ini bagian dukungan nyata Bank Mandiri sebagai mitra strategis Pemerintah dalam mempercepat penanganan dampak bencana.

“Serta memastikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan secara berkelanjutan,” tutur Riduan dalam keterangan resminya, Sabtu (3/1/2025).

Kehadiran Jembatan Bailey, sambung Riduan, diharapkan mampu menjadi solusi sementara yang efektif sebelum pembangunan infrastruktur permanen direalisasikan.

Riduan menegaskan, sinergi antara Bank Mandiri dan Kemenhan mencerminkan kolaborasi lintas sektor dalam merespons kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Menurutnya, pemilihan Jembatan Bailey didasarkan pada karakteristiknya yang adaptif, mudah dipasang, serta dapat dipindahkan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Sinergi ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mempercepat penanganan bencana,” ujarnya.

Lebih lanjut Riduan menambahkan, melalui kolaborasi tersebut, pihaknya berharap jembatan tersebut dapat menjadi sarana penghubung vital bagi mobilitas warga, distribusi bantuan, serta akses terhadap layanan publik.

“Dengan demikian, proses

pemulihan sosial dan ekonomi di daerah terdampak dapat berlangsung lebih optimal,” ujarnya.

Adapun sejak akhir November hingga pertengahan Desember 2025, emiten berkode saham BMRI ini telah menyalurkan dan menyiapkan lebih dari 288.889 paket bantuan ke wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbang), mulai dari paket sembako, obat-obatan, keperluan wanita dan balita, selimut, genset, air bersih, kasur lipat, pakaian layak pakai. Hal ini sebagai bagian dari respons kemanusiaan berkelanjutan perseroan.

Pada awal tahun, Bank Mandiri juga terlibat aktif dalam mendukung pembangunan 600 unit Hunian Danantara (Huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri kembali mengirimkan Relawan Mandiri Tanggap Bencana yang menjadi ujung tombak pendampingan langsung masyarakat terdampak di lapangan, untuk menggantikan Relawan tahap awal di Kabupaten Gayo Lwes.

Sebanyak 20 Relawan Mandiri Tanggap Bencana yang tergabung pada *batch* kedua ini berasal dari lintas unit bisnis dan kantor wilayah, termasuk Mandiri Emergency Response Unit (Team MERU) Mandiri Club.

Di lapangan, Relawan Mandiri Tanggap Bencana tidak hanya membantu pendistribusian logistik dan bantuan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap operasional posko tanggap bencana, yang meliputi posko dapur umum, kesehatan, pendidikan, serta *trauma healing*. ■ DWI



SERAHKAN BANTUAN: Direktur Utama Bank Mandiri Riduan (keempat dari kiri) secara simbolis menyerahkan bantuan lima jembatan bailey untuk membantu pemulihan konektivitas di wilayah terisolasi akibat dampak bencana di Sumatera kepada Pemerintah melalui Wakil Menteri Pertahanan (Wamen) Donny Ermawan Taufanto (keempat dari kanan) di Kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

FOTO: DOK. BANK MANDIRI

Sinyal Iklim Pasar Modal RI Kian Kondusif 2 Perusahaan Jumbo Akan Melantai Di BEI

Iklim pasar modal di Indonesia kian kondusif. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat enam perusahaan tengah bersiap melantai di bursa melalui *Initial Public Offering* (IPO), termasuk dua emiten *lighthouse* berkapitalisasi besar dari sektor infrastruktur dan tambang.

DIREKTUR Penilaian Perusahaan BEI I Nyoman Gede Yetna menjelaskan, dari enam perusahaan tersebut, di antaranya ada perusahaan *lighthouse*, yakni emiten dengan kapitalisasi pasar minimal Rp 3 triliun dan *free float* minimal 15 persen).

“Lighthouse ada dua, yakni dari sektor infrastruktur dan *mining* (tambang),” ujar Nyoman di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Nyoman menekankan, pada intinya BEI terbuka terhadap rencana IPO dari perusahaan-perusahaan berbagai sektor, mulai dari sektor industri hingga keuangan.

Kembangkan Pasar Modal Terpisah, Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, sejauh ini belum ada BUMN yang tengah menjalani proses IPO.

Menurut Iman, IPO BUMN tergantung dari kesiapan perusahaan dan anak usahanya. Bursa dalam hal ini terus mendukung dan melakukan edukasi terkait IPO.

“Upaya itu diharapkan bisa meningkatkan kesiapan perusahaan BUMN dan anak usahanya untuk masuk ke pasar modal,” kata Iman dalam keterangannya, Minggu (4/1/2026).

Sebagai informasi, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGeo) merupakan BUMN terakhir yang melakukan IPO pada 2023.

Lebih lanjut Iman menjelaskan, BEI telah menyiapkan *masterplan* pengembangan pasar modal 2026-2030 untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan dan meningkatkan daya saing global.

Dalam peta jalan tersebut, BEI

menetapkan tujuan besar pada 2030, yakni membangun pasar modal yang inovatif, transparan, inklusif, serta tumbuh secara global.

“Target ambisius ini didukung oleh penguatan infrastruktur pasar, peningkatan kualitas emiten dan investor, serta perluasan partisipasi publik,” kata Iman.

Dia menambahkan, BEI juga mendorong inovasi produk dan pendalaman pasar agar pasar modal tidak hanya tumbuh dari sisi nilai, tetapi juga berperan lebih besar dalam pembiayaan jangka panjang ekonomi nasional.

“Kami percaya, agar tercapai visi ini dibutuhkan sinergi seluruh *stakeholder*,” ujarnya.

Pihaknya sangat mengharapkan dukungan dan kolaborasi dari emiten, anggota bursa, dan seluruh pemangku kepentingan agar Masterplan BEI 2026-2030 dapat terlaksana dengan baik, dan memberikan manfaat yang nyata bagi pasar modal Indonesia.

Selanjutnya, BEI menetapkan sejumlah target kinerja untuk tahun 2026. Salah satunya adalah Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) yang diproyeksikan mencapai Rp 15 triliun. Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi domestik maupun global.

BEI juga membidik total 555 pencatatan efek sepanjang 2026, termasuk di dalamnya 50 perusahaan baru yang diharapkan melakukan IPO.

“Dari sisi partisipasi investor, BEI menargetkan penambahan sebanyak 2 juta *Single Investor Iden-*



Iman Rachman

FOTO: IDX

tification (SID) baru,” harapnya.

Menyoal ini, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta berpendapat, memang perlu pertimbangan bagi BUMN untuk melakukan IPO tahun ini.

Dia melihat, dalam gelaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di penghujung 2025, mayoritas BUMN melakukannya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas bisnis, serta perbaikan kinerja.

“Ini penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar ke depan. Termasuk menjadi pertimbangan IPO ke depan,” ucap Nafan kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Nafan menilai, sebenarnya ada beberapa perusahaan pelat merah yang berpotensi menggelar IPO, yakni BUMN di sektor energi.

“Selain PGE sebelumnya, Pertamina Hulu Energi memiliki sentimen positif seiring kebijakan Pemerintah yang menaruh perhatian besar pada ketahanan energi nasional,” katanya.

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor hulu migas, perusahaan ini diperkirakan akan menjadi salah satu IPO strategis yang akan menarik

minat investor institusi.

Selanjutnya Inalum, imbuhnya, yang diyakini akan menjadi salah satu IPO bernilai jumbo yang paling dinantikan pasar. Di mana Inalum menjadi BUMN besar dalam industri logam strategis, yang sejalan dengan agenda industrialisasi nasional.

“Salah satu pertimbangannya adalah, penetapan sektor baja sebagai salah satu proyek prioritas dalam agenda Danantara, bisa menjadi katalis utama bagi prospek Inalum ke depan,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi memahami, partisipasi BUMN dan anak perusahaannya di pasar modal memiliki peran strategis dalam memperkuat likuiditas serta diversifikasi instrumen investasi.

“Untuk itu, OJK secara berkelanjutan melaksanakan program pendalaman pasar bersama para pelaku pasar modal, seperti perusahaan efek,” ucapnya dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (14/12/2025).

Menurut Inarno, melalui program tersebut, OJK melakukan sosialisasi dan diskusi dengan perusahaan yang memiliki kesiapan untuk melakukan IPO, termasuk BUMN dan anak perusahaannya, guna meningkatkan pemahaman terkait proses penawaran umum serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi.

Namun demikian, keputusan untuk melakukan IPO sepenuhnya merupakan pertimbangan dan kebijakan bisnis masing-masing perusahaan.

“Peran OJK adalah memastikan proses berjalan secara profesional, transparan, serta melindungi kepentingan investor,” jelasnya.

Saat ini, terdapat total 37 pe-

rusahaan BUMN dan anak usaha BUMN yang sudah melantai di bursa. Secara rinci, sebanyak 14 perusahaan BUMN dan 23 anak usaha BUMN.

Delisting Tahun 2026 Sementara itu, BEI dalam Pengumuman BEI No.: Peng-00003/BEI.PLP/12-2025, mengumumkan 70 perusahaan tercatat yang berpotensi dibatalkan pencatatan sahamnya (*delisting*) pada 2026.

Potensi *delisting* dilakukan karena perusahaan mengalami suatu kondisi, atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Baik secara finansial atau secara hukum, dan perusahaan tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

Perusahaan juga berpotensi di-*delisting* apabila tidak memenuhi persyaratan pencatatan di BEI dan/atau telah mengalami suspensi efek, baik di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, dan/atau di seluruh Pasar, paling kurang selama 24 bulan terakhir.

“Perusahaan tercatat yang mengalami suspensi efek selama enam bulan berturut-turut juga berpotensi untuk dilakukan *delisting* dan BEI wajib mengumumkannya kepada publik,” jelas pengumuman BEI tersebut dikutip, Senin (5/1/2026).

Per 30 Desember 2025, suspensi efek atas perusahaan tercatat berikut ini telah mencapai jangka waktu enam bulan atau lebih.

Berdasarkan pengumuman tersebut, terdapat empat BUMN yang masuk dalam daftar perusahaan yang berpotensi *delisting*, yaitu PT Indofarma (Persero) Tbk, PT PP Properti (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. ■ DWI

Permudah Pengguna Mobil Listrik Isi Daya PLN Kerek Layanan Melalui PLN Mobile

PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) terus meningkatkan layanan pengisian daya kendaraan listrik tetap terjaga pada fase arus balik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Teranyar, melayani melalui fitur baru, AntreEV dan *Trip Planner* pada Aplikasi PLN Mobile.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, fase arus balik kerap dihadapi masyarakat dalam kondisi perjalanan panjang. Sehingga kepastian layanan menjadi faktor penting untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan.

Lewat fitur tersebut, kata Darmawan, pengguna kendaraan listrik dapat menikmati kemudahan, serta kenyamanan layanan pengisian daya di tengah kepadatan perjalanan arus balik.

Pihaknya ingin memastikan pengguna kendaraan listrik tetap mendapatkan layanan pengisian daya yang andal.

“Dukungan sistem digital kami hadirkan untuk memberikan kemudahan dan ketenangan bagi pengguna selama perjalanan arus balik,” ujar Darmo-sapaan Darmawan, dalam keterangannya, Senin (5/1/2025).

Lebih lanjut Darmo menjelaskan, fitur AntreEV untuk mendukung kelancaran layanan pengisian daya di lapangan.

Melalui sistem antrean digital, kata dia, pengguna dapat memperoleh kepastian giliran tanpa harus menunggu atau mengular di area SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum).

“Selama menunggu antrean, pengguna memiliki fleksibilitas untuk beristirahat di lokasi terdekat yang lebih nyaman, sehingga area pengisian tetap terhib dan aktivitas di sekitarnya tidak terganggu,” terangnya.

Menurut Darmo, fitur baru ini membantu menjaga kelancaran di sekitar lokasi SPKLU, sekaligus memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna kendaraan listrik selama perjalanan arus balik.

Tidak hanya antrean digital,



Darmawan Prasodjo

pihaknya juga menyediakan fitur *Trip Planner* yang dapat dinikmati pengguna untuk menyusun rute arus balik, dengan mempertimbangan jarak tempuh dan kebutuhan pengisian daya. Sekaligus mengetahui pilihan lokasi SPKLU di sepanjang jalur perjalanan.

Ia optimistis, perencanaan sejak awal ini membantu pengguna mengatur waktu perjalanan secara lebih terukur, serta mendukung kelancaran layanan pengisian daya, agar tidak terjadi penumpukan di satu titik.

Sebagai bagian dari kesiapsiagaan selama periode Nataru, perseroan terus menyiagakan 4.516 SPKLU di 2.935 lokasi di seluruh Indonesia yang didukung 5.190 personel.

Khusus di jalur utama Sumatra-Jawa-Bali, PLN juga mengoperasikan 1.515 unit SPKLU, jumlah ini meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya.

Tidak hanya itu, PLN menyebarkan 15 unit SPKLU mobile untuk mengantisipasi kondisi darurat maupun lonjakan pengguna pada titik-titik krusial.

Selain itu, untuk mendukung perjalanan jarak jauh, perseroan juga menyediakan 117 posko siaga SPKLU yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai titik singgah untuk beristirahat sejenak sambil mengisi daya kendaraan listrik.

“Kami berharap perjalanan arus balik pengguna kendaraan listrik dapat berlangsung aman, nyaman dan lancar,” tutup Darmo. ■ DWI

Kawal Pasokan Gas Bumi Nasional PGN Perkuat Fasilitas Stasiun Gas Pagardewa

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menegaskan peran vital Stasiun Gas Pagardewa sebagai simpul utama penjaga keandalan pasokan gas bumi nasional.

Fasilitas ini menjadi titik krusial dalam sistem transmisi South Sumatra-West Java (SSWJ) sepanjang 1.004 kilometer (km), yakni memasok kebutuhan gas dari Sumatera hingga Jawa bagian Barat.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta mengatakan, Stasiun Pagardewa berfungsi sebagai infrastruktur utama pengatur tekanan dan kapasitas jaringan transmisi gas bumi dalam penyaluran gas kepada pelanggan sektor kelistrikan, komersial dan industri.

“Dengan optimalisasi fasili-

tas kompresor, *metering*, serta *jumperline* yang meningkatkan kapasitas *linepack*, PGN memastikan distribusi gas tetap andal dan stabil,” ujar Hery dalam rilisnya, Senin (5/1/2026).

Hery mengatakan, fasilitas ini memungkinkan suplai gas terpenuhi mulai dari Sumatera, Lampung, hingga Jawa bagian Barat.

PGN menegaskan komitmennya menjaga *asset integrity* melalui pemeliharaan dan inspeksi berbasis risiko. Seperti pemanfaatan *Integrated Monitoring Center* (IMOC) yang memungkinkan pemantauan *real-time* terhadap kondisi infrastruktur, data pelanggan, dan aktivitas niaga.

“Seluruh infrastruktur yang kami operasikan, harus tetap



FOTO: INSTAGRAM PRIBADI

terjaga keandalannya untuk memenuhi kebutuhan energi nasional,” ucapnya.

Hery melanjutkan, selain menjaga keandalan operasi, PGN terus memperkuat fleksibilitas

“Dengan optimalisasi fasilitas kompresor, *metering*, serta *jumperline* yang meningkatkan kapasitas *linepack*, PGN memastikan distribusi gas tetap andal dan stabil.”

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta

pasokan melalui pengembangan infrastruktur gas bumi, termasuk pemanfaatan LNG (*Liquefied Natural Gas*).

Upaya ini sejalan dengan strategi bisnis G-A-S (*Grow-Adapt-*

Step Out) yang tengah dijalankan perusahaan.

Program strategis tersebut mencakup perluasan jaringan gas rumah tangga, pembangunan pipa Bahan Bakar Minyak (BBM) Cikampek-Plumpang, revitalisasi tanki LNG (*Liquefied Natural Gas*) Arun, serta pembangunan fasilitas *injection point* untuk pengembangan *bio-methane*.

Hery menegaskan, dengan pengalaman panjang dalam mengelola jaringan gas bumi nasional, PGN terus berkomitmen menghadirkan energi bersih, aman, dan berkelanjutan.

“Terutama pemenuhan bagi kebutuhan energi masyarakat, serta ketahanan energi nasional,” pungkasnya. ■ DWI

Curhat Nyok...

Penyandang Disabilitas Curhat Tak Bisa Nyebrang Melalui JPO Halte Roxy

YANG terhormat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Saya Fahmi, penyandang disabilitas daksa pengguna kursi roda. Melalui curhatan ini, saya ingin menyampaikan keluhan sekaligus harapan besar kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengenai kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Halte Roxy, BRT Koridor 3.

Saat ini, trotoar di sekitar kawasan Halte Roxy sebenarnya sudah cukup ramah disabilitas. Permukaannya relatif baik, tersedia *guiding block*, dan memungkinkan pengguna kursi roda untuk bergerak dengan aman. Namun, akses tersebut terputus ketika harus melintasi JPO Halte Roxy. JPO tersebut sama sekali tidak memiliki fasilitas aksesibilitas, seperti *ramp*, *lift*, maupun jalur yang memungkinkan pengguna kursi roda menyeberang secara mandiri dan aman.

Akibatnya, saya dan pengguna kursi roda lainnya tidak bisa menggunakan fasilitas publik yang seharusnya inklusif. Untuk menyeberang, kami terpaksa memutar jauh, meminta bantuan orang lain atau bahkan mengambil risiko menyeberang di jalan yang padat kendaraan. Kondisi ini tentu sangat berbahaya dan bertentangan dengan semangat Jakarta sebagai kota yang ramah disabilitas.

Saya memohon JPO Halte Roxy direvitalisasi dengan konsep universal design sehingga dapat diakses oleh semua kalangan. Termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan ibu dengan stroller. Aksesibilitas bukan fasilitas tambahan, melainkan hak dasar warga negara.

IG: @fahmiadefarhan

WA Aje...

Warga Karet Butuh RPTRA

Selamat pagi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta. Mohon perhatiannya untuk wilayah Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kami sangat membutuhkan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang layak. Saat ini anak-anak di sekitar kami terpaksa bermain di pinggir jalan raya karena tidak ada ruang bermain yang aman dan ramah anak. Mohon dibuatkan RPTRA agar anak-anak bisa tumbuh dan bermain dengan aman.

081386731XXX

Kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, izin bertanya terkait status Jalan Tanjung Duren Timur 2, tepatnya dari depan Mall Taman Anggrek hingga depan Hotel B Fashion. Apakah jalan tersebut milik Pemprov atau swasta? Sudah bertahun-tahun hanya ditambal sulam dan tidak pernah diaspal ulang. Kini kondisinya rusak parah, banyak lubang, dan sering menyebabkan kemacetan serta membahayakan pengendara.

085672394XXX

Untuk Wali Kota Tangerang, tolong dong segera perbaiki Jalan Moh. Toha, Karawaci. Jalan rusak parah, banyak lubang besar, dan penerangan sangat minim terutama malam hingga dini hari. Kondisi ini sudah memakan korban. Pada Kamis (11/12/2026) malam, seorang pengendara motor perempuan mengalami kecelakaan dan luka-luka. Mohon segera diperbaiki sebelum korban terus bertambah.

081802713XXX

Pembaca diundang menyampaikan informasi, keluhan dan komentar tentang kepentingan umum ke email: rakyatmerdeka12@gmail.com dan WA ke nomor: 085770411900

PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI

Head Office : Jl. H. Cokong, Kuningan Center Lot 1, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Cabang Depok : Jl.Tole Iskandar No.11, Sukmajati, Cidodong, Kota Depok 16475

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN

PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) BOGOR akan melaksanakan Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, dihadapan Pejabat Lelang KPKNL BOGOR terhadap barang tidak bergerak atas nama Debitur berupa :

NASABAH	OBJEK LELANG	HARGA LIMIT (Rp)	UANG JAMINAN LELANG (Rp)
FADHOLI	Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM NIB No.0400046108.0 dengan Kode Sertifikat BSSXUWJ (Dahulu: SHM No.04000) dengan luas tanah 210 M ² , yang terletak di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sertipat di kanal Kp.Paduaran RI 002 Rv.009, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat an, Fadholi.	350.000.000	70.000.000

Syarat-syarat Lelang :

- Penawaran Lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta (a-uction) dengan penawaran terbuka (open bidding) yang diayunkan pada Aplikasi Lelang pada alamat domain lelang.go.id
- Nominal yang Jaminkan yang disetorkan ke Rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan, serta setoran dilakukan sekaligus (tidak dicicil) / Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL BOGOR, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Calon Peserta lelang wajib melakukan penawaran dan penawaran tersebut paling sedikit sama dengan nilai limit.
- Calon peserta lelang dapat melihat obyek yang akan dilelang sejak pengumuman lelang diterbitkan.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme penawaran menjadi beban peserta lelang.
- Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari obyek yang dilelang dengan kondisi apa adanya (as. is), Syarat lainnya akan ditentukan pada saat lelang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : Panitia Lelang PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI Telp. (021) 7715-145 atau KPKNL Bogor Telp (0251) 8315453.

PELAKSANAAN LELANG :

Cara Penawaran	Penawaran lelang Open Bidding yang diakses pada alamat domain lelang.go.id
Hari dan tanggal lelang	Selasa, 20 Januari 2026
Waktu Penawaran	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	Selasa, 20 Januari 2026, Pukul 10.40 WIB (Sesuai Waktu Server)
Tempat Pelaksanaan Lelang	KPKNL Bogor, Jalan Veteran No. 45 Kota Bogor , Ruang E-Auction
Penetapan Pemegang	Selama batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Depok, 06 Januari 2026

PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI

Cabang Depok

Ttd.

Pemimpin Cabang Depok

KPKNL BOGOR

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th 1996, PT. Bank DKI melalui jasa pralelang PT.Balai Mandiri Prasarana(Baleman). Akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran melalui internet dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor terhadap aset jaminan debitur an. Ronny Leonardi

- Sebidang tanah seluas 66 M² berikut bangunan dan segala sesuatu diatasnya sesuai dengan SHM No. 2731/Rawakalong a. Ronny Leonardi , yang terletak di Perumahan Syadira Pamulang Residence, Blok A Kav. 2, Kelurahan Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Limit Rp 224.000.000,- ; Jaminan Rp 45.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang :

- Cara Penawaran : Melalui Internet (Open Bidding)
- Hari, Tanggal Lelang : **Selasa, 20 Januari 2026**
- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang
- S.d batas akhir penawaran
- Batas Akhir Penawaran : **20 Januari 2026, Pukul 10.15 Waktu Server** (Sesuai Waktu Indonesia Barat)
- Alamat Web : <https://lelang.go.id>
- Penetapan Pemegang : Setelah Batas Akhir Penawaran
- Pelunasan Harga Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
- Bea Lelang Pembeli : 2 % dari harga lelang
- PPN 1.1% Ditanggung Pembeli
- BPHTB 5 % Ditanggung Pembeli
- Tempat Lelang : KPKNL Bogor
- Jl. Veteran No.45 Bogor

Keterangan:

- Nominal Jaminan yang disetorkan ke Rekening VA (Virtual Account) PT BNI (Persero) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus sudah efektif diterima KPKNL Bogor selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme penawaran menjadi beban peserta lelang.

Syarat-syarat bagi Peserta Lelang :

- Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website <https://lelang.go.id> Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut.
- Obyek Lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminal lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Bogor dan PT. Bank DKI
- Peminat Lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat obyek Lelang mulai Pengumuman ini terbit sampai dengan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Untuk Informasi lainnya dapat menghubungi **BALEMAN Telp. (0251) 8360 374 / Leny 0813 1411 8988**

Bogor, 06 Januari 2026

Ttd

PT. Bank DKI

Grup Restrukturisasi Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

KPKNL BOGOR

BANK DKI



JAKARTA MULAI MACET LAGI: Potret lalu lintas di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2025). Kendaraan bermotor di jalan tersebut tampak padat, mulai normal kembali seperti biasa setelah libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

FOTO : DWI PAMUDO/RAKYAT MERDEKA/RM.ID

APBD 2026 Susut Rp 10,5 Triliun

Jakarta Dituntut Ketat & Efisien Kelola Anggaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 ditetapkan Rp 81,32 triliun. Anggaran ini menurun Rp 10,54 triliun dari tahun lalu. Dengan penyusutan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dituntut lebih ketat dan efisien dalam membelanjakan anggaran.

APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.

Pengundangan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 serta Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Total APBD DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun, atau turun Rp 10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp 91,86 triliun.

Penurunan ini dipicu merosotnya Pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, yang sebelumnya Rp 26,14 triliun menjadi hanya Rp 11,16 triliun.

Menyikapi penyusutan anggaran tersebut, Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI memastikan pengelolaan APBD 2026 lebih efisien, akuntabel, serta terbebas dari program yang berpotensi menjadi pemborosan.

Penasehat Fraksi Partai Demokrat, Mujiyono, menegaskan bahwa setiap belanja Pemerintah harus diuji dari manfaat nyata-nya bagi warga. “Setiap belanja Pemerintah harus diuji manfaatnya bagi warga, bukan sekadar besar kecilnya alokasi,” ujar Mujiyono, Rabu (31/12/2025).

Meski begitu, Demokrat menilai penetapan lima isu strategis Pemprov DKI, yakni penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan kemacetan, sudah berada di jalur yang tepat.

Menurut Mujiyono, kelima prioritas tersebut menyentuh persoalan paling mendasar yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup warga Jakarta.



FATIMAH AZ ZAHRA/RAKYAT MERDEKA/RM.ID

Rapat Paripurna DPRD DKI.

Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki banyak program prioritas dalam rangka menjadi Kota Global,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkomitmen mengoptimalkan penggunaan APBD agar manfaatnya dirasakan seluruh warga. Karena itu, Pemprov DKI memfokuskan anggaran pada sejumlah isu strategis.

Di antaranya penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, serta kemacetan. “Kami berharap penetapan APBD 2026 dapat mengakselerasi pelaksanaan program dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta mulai awal tahun,” kata Pram.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Roland, memaparkan, *mandatory spending* untuk infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar 43,06 persen dari total belanja daerah di luar bantuan keuangan. “Kalau sesuai aturan, minimal harus dialokasikan hanya 40 persen,” ungkapnya.

Dengan porsi tersebut, Pemprov DKI mengalokasikan Rp 3,77 triliun untuk peningkatan infrastruktur kota agar lebih layak dan memadai. Selain itu, peningkatan produktivitas dan

daya saing ekonomi berkelanjutan dialokasikan Rp 582 miliar, serta peningkatan modal manusia berdaya saing sebesar Rp 17,58 triliun.

Anggaran juga dialokasikan untuk penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri sebesar Rp 2,70 triliun, transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif Rp 2,36 triliun, penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit Rp 7,82 triliun, serta optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim Rp 6,27 triliun.

“Dalam urusan pekerjaan umum dan tata ruang, kami membagi menjadi beberapa pos, yaitu pengendalian banjir dengan anggaran Rp 3,64 triliun, pengelolaan sampah Rp 1,38 triliun, serta pembangunan jembatan dan *flyover* sebesar Rp 289,72 miliar,” bebernya.

Untuk sektor perhubungan, Pemprov DKI mengalokasikan subsidi transportasi umum, meliputi subsidi Transjakarta Rp 3,75 triliun, Bus Sekolah Rp 105,38 miliar, MRT Jakarta Rp 536,70 miliar, LRT Jakarta Rp 325,28 miliar, serta layanan angkutan kapal perairan Rp 100,19 miliar.

“Untuk urusan ketenagakerjaan, kami akan terus mengadakan pelatihan keterampilan kerja

kejuruan dan Mobile Training Unit (MTU) dengan anggaran sebesar Rp 63,44 miliar, pelatihan SIM A sebesar Rp 1,2 miliar, pembentukan tenaga kerja mandiri sebesar Rp 4,33 miliar, dan pelatihan peningkatan produktivitas sebesar Rp1,25 miliar,” paparnya.

Di bidang pendidikan, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 19,75 triliun, atau 26,5 persen dari belanja daerah. Anggaran tersebut antara lain untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Rp 3,25 triliun dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Rp 399 miliar. Selain itu, disediakan anggaran sekolah swasta gratis Rp 282,46 miliar serta rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan Rp 126,12 miliar.

Sementara di sektor kesehatan, anggaran dialokasikan untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp 1,40 triliun, pembangunan fasilitas kesehatan Rp 360,49 miliar, penyediaan alat kesehatan Rp 165,16 miliar, serta Pasukan Putih Rp 43,49 miliar.

Untuk bantuan sosial, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Rp 625,89 miliar, Kartu Anak Jakarta (KAJ) Rp 100,10 miliar, serta Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Rp 76,45 miliar.

Di sektor industri dan perdagangan, anggaran dialokasikan untuk program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Rp 13,34 miliar, pemberdayaan UMKM Rp 17,59 miliar, serta pembangunan dan perencanaan industri Rp 23,55 miliar.

Sementara, untuk urusan komunikasi dan informatika, Pemprov DKI mengalokasikan Rp 185,29 miliar untuk managed service CCTV dan Rp 18,25 miliar untuk sistem pengendalian banjir.

“Seluruh program ini akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kami berharap, APBD 2026 ini dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh warga Jakarta,” tandasnya. ■ DRS

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Perekonominan Rakyat Marenasabank selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I, terhadap jaminan Debitur atas nama **MUHAMAD ANDRIAN . S** berupa :

Obyek Lelang	Nilai Limit / Jaminan Penawaran lelang	Syarat – Syarat Lelang
Sebidang tanah berikut bangunan SHM No. 8869/ Kebagusan seluas 400 M ² terletak di GG Kelapa 45 Rt. 004 Rw. 03 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, a.n 1. LUSMARINA SE, M.M. 2. DIAN HERLINA, 3. MIRANTI HERNITA	Nilai Limit Rp 4.521.000.000,- Jaminan Lelang Rp 452.100.000,-	- Peserta lelang diwajibkan melihat dan dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang yang ditawarkan dengan keadaan apa adanya (as is) - Lelang dapat dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang sesuai ketentuan - Nominal Jaminan yang di setorkan ke Rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang di syarakan - Jaminan Harus sudah efektif di terima oleh KPKNL Selambat lambatnya 1 (satu) hari sebelum Pelaksanaan Lelang - Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta Lelang - Pemegang lelang di kenakan PPN 1.1 % dari harga lelang - Calon peserta Mendafar dan mengkonfirmasi pada alamat Pelaksanaan lelang secara terbuka (Open Bidding) tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan aplikasi pada alamat Domain https://portal.lelang.go.id dan/atau https://lelang.go.id
Hari Tanggal Waktu Penawaran Batas Akhir Penawaran Alamat Domain Tempat Lelang	: Selasa : 20 Januari 2026 : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran : 20 Januari 2026 Pukul 10:30 WIB (sesuai waktu server) : lelang.go.id : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I Jalan Prajurit Kko Usman Dan Harun No. 10 Jakarta	
Penetapan Pemegang		: Setelah batas akhir penawaran.
Pembukaan Penawaran dan penetapan Pemegang Lelang		Pembukaan penawaran dan penetapan Pemegang oleh Pejabat lelang dilakukan sesaat setelah batas akhir penawaran tersebut di atas.
Pelunasan harga lelang		5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea lelang Pembeli		2 % dari harga lelang
Informasi lebih Lanjut		PT. BPR MARENSABANK Ruko Mall WTC Serpong Unit Ruko No. 5819 Jl Raya Serpong No. 39 Kel Pondok Jagung Kec Serpong Utara Tangerang Selatan – 15326 Telp 021-53155739 Fax 02153152243

KPKNL JAKARTA I

Tangerang, 06 JANUARI 2026

Ttd

BPR MARENSABANK

PT. BPR MARENSABANK

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th 1996, PT. Bank DKI melalui jasa pralelang PT.Balai Mandiri Prasarana(Baleman). Akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran melalui internet dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor terhadap aset jaminan debitur an. TOFAN SETIAWAN

- Sebidang tanah seluas 98 M² berikut bangunan dan segala sesuatu diatasnya, sesuai dengan SHM No. 04394/Bedahan an. Tuan Tofan Setiawan, terletak di Perumahan Widia Residence Blok B No. 19, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (Limit Rp 475.000.000,- ; Jaminan Rp 95.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang :

- Cara Penawaran : Melalui Internet (Open Bidding)
- Hari, Tanggal Lelang : **Selasa, 20 Januari 2026**
- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
- Batas Akhir Penawaran : **20 Januari 2026, Pukul 10.15 Waktu Server** (Sesuai Waktu Indonesia Barat)
- Alamat Web : <https://lelang.go.id>
- Penetapan Pemegang : Setelah Batas Akhir Penawaran
- Pelunasan Harga Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
- Bea Lelang Pembeli : 2 % dari harga lelang
- PPN 1.1% Ditanggung Pembeli
- Tempat Lelang : KPKNL Bogor
- Jl. Veteran No.45 Bogor

Keterangan:

- Nominal Jaminan yang disetorkan ke Rekening VA (Virtual Account) PT BNI (Persero) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus sudah efektif diterima KPKNL Bogor selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme penawaran menjadi beban peserta lelang.

Syarat-syarat bagi Peserta Lelang :

- Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website <https://lelang.go.id> Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut.
- Obyek Lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminal lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Bogor dan PT. Bank DKI
- Peminat Lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat obyek Lelang mulai Pengumuman ini terbit sampai dengan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Untuk Informasi lainnya dapat menghubungi **BALEMAN Telp. (0251) 8360 374 / Pak Ansias 0813 1099 1135**

Bogor, 06 Januari 2026

Ttd

PT. Bank DKI

Grup Restrukturisasi Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

KPKNL BOGOR

BANK DKI

Follow Us

Media Sosial Rakyat Merdeka Untuk Info Berita Terupdate

Rakyat Merdeka

FORMULA 1

Lewis Hamilton Bete Diisukan Mau Pensiun



MASA depan juara dunia tujuh kali Formula 1, Lewis Hamilton, ramai dibicarakan di lingkungan paddock. Apalagi setelah musim perdana dengan tim legendaris Italia, Ferrari, tidak sesuai ekspektasi.

Sepanjang musim 2025, Hamilton terus berusaha beradaptasi dengan mobil Ferrari. Hingga akhir musim, pembalap Inggris itu tak sekalipun menapakan kaki di podium.

Dari perolehan poin, Hamilton terpaut 86 poin dari rekan setimnya, Charles Leclerc. Hal ini memicu berbagai pendapat mengenai performa Hamilton. Bahkan hingga faktor usia yang mempengaruhi kecepatan refleks pun menjadi pembicaraan.

Menanggapi isu yang berkembang, Hamilton memberikan pernyataan tegas usai seri penutup di Abu Dhabi. Ia menyatakan bahwa determinasi dan kecintaannya terhadap olahraga otomotif ini tetap menjadi mesin penggerak utamanya di balik kemudi.

”Yang memotivasi saya adalah kecintaan pada balap. Saya dapat mengandalkan dukungan luar biasa dari orang-orang di sekitar saya dan para penggemar. Saya tidak melupakan tujuan saya; saya tahu persis apa yang ingin saya capai dan saya sedang berupaya mewujudkannya,” ujar Hamilton sebagaimana dikutip dari *Motorsport*.

Pembalap berusia 41 tahun tersebut juga menyikapi kritik dengan nada yang lugas, merujuk pada penca-

paian kariernya yang belum tertandingi. ”Kepada semua orang yang membicarakan pensiun saya, tak satu pun dari mereka yang mencapai apa yang telah saya capai. Mereka tidak berada di level saya,” tambahnya.

Meski demikian, pembelaan diri Hamilton tidak serta-merta meredam rasa skeptis dunia F1. Ralf Schumacher, mantan pembalap F1 yang kini menjadi analis, menilai ada hambatan psikologis dalam cara Hamilton menghadapi masalah teknis di Ferrari.

Schumacher mengamati bahwa rasa frustrasi yang kerap diperlihatkan Hamilton menunjukkan keterbatasan sang pembalap dalam berkompromi dengan karakter mobil yang berbeda dari pengalaman panjangnya di tim sebelumnya. Kepala Tim Ferrari, Fred Vasseur secara implisit juga memberikan sinyal bahwa tantangan utama terletak pada kemampuan pembalap untuk beradaptasi dengan filosofi desain mobil tim.

Menurut Schumacher, jika Hamilton tidak segera menemukan ritme kualifikasi dan meminimalkan kesalahan mendasar, masa depannya di Ferrari akan terus berada di bawah tekanan besar.

Bagi Hamilton, musim 2026 bukan sekadar tahun balapan biasa, melainkan puncak pembuktian apakah reputasi sebagai salah satu pembalap terbesar sepanjang masa masih relevan dengan realitas performanya saat ini. ■ SAR

MALAYSIA OPEN 2026

Perang Saudara Di Ganda Putra

Turnamen pembuka musim BWF World Tour Super 1000 Malaysia Open 2026 langsung menyajikan drama bagi tim bulu tangkis Indonesia. Berdasarkan hasil undian yang dirilis, terjadi “perang saudara” di sektor ganda putra.

PASANGAN Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani dijadwalkan langsung bentrokan dengan junior mereka, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, pada babak pertama yang akan berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, 6-11 Januari mendatang.

Pertemuan dini ini memberikan kerugian sekaligus keuntungan bagi tim Indonesia, karena sudah dipastikan satu wakil akan tersingkir lebih awal, namun satu tiket menuju babak kedua sudah berada di tangan.

Sabar/Reza mengawali turnamen ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah sukses membawa pulang medali emas SEA Games 2025 di Thailand. Di sisi lain, laga ini akan menjadi momen bersejarah bagi Raymond/Joaquin yang akan menjalani debut di level Super 1000 setelah performa mereka menanjak drastis di penghujung musim lalu.

Selain duel sesama Indone-

sia, sorotan juga tertuju pada duet Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri yang menempati posisi unggulan keenam.

Pasangan yang mulai dipadukan musim lalu ini akan ditantang oleh wakil Taiwan, Fang Chih Lee/Fang Jen Lee. Laga ini diprediksi akan berlangsung menarik mengingat ini adalah pertemuan perdana bagi pasangan Fajar/Fikri dengan duet Fang bersaudara tersebut.

Meski demikian, Fajar diuntungkan dengan catatan sejarah yang cukup dominan saat masih berpasangan dengan Muhammad Rian Ardianto, di mana ia mengantongi lima kemenangan dari tujuh pertemuan melawan pasangan Taiwan tersebut.

Indonesia juga mengirimkan kekuatan penuh di sektor lain demi mengulang memori manis gelar juara Malaysia Open 2023.

Di sektor tunggal putra, Jonatan Christie akan berhadapan dengan Lee Chia-hao, sementara



Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani

Alwi Farhan harus bekerja keras menghadapi unggulan ketujuh asal Prancis, Alex Lanier.

Sektor tunggal putri sepenuhnya bertumpu pada Putri Kusuma Wardani, sedangkan ganda

putri mengandalkan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitarsi.

Di nomor ganda campuran, harapan Indonesia diletakkan pada pundak Jafar Hidayatul-

lah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu serta pasangan Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata untuk melaju sejauh mungkin di turnamen awal tahun ini. ■ SAR

UNITED CUP 2026

Hurkacz Tundukkan Petenis Peringkat 3

KERAGUAN publik mengenai sisa-sisa performa Hubert Hurkacz pasca-cedera parah terjawab tuntas di Ken Rosewall Arena, Sydney, Senin (5/1/2026) malam waktu setempat.

Petenis andalan Polandia itu menandai kembalinya ke lapangan kompetitif dengan penampilan yang seolah “kesetanan”. Ia membungkam petenis peringkat tiga dunia, Alexander Zverev, dalam laga penyisihan grup

United Cup 2026.

Terlempar ke peringkat 83 dunia akibat absen panjang, Hurkacz tampil tanpa celah untuk mengunci kemenangan dua set langsung 6-3, 6-4, sekaligus memberikan keunggulan 1-0 bagi Tim Polandia atas Jerman.

Penampilan Hurkacz malam itu benar-benar di luar dugaan. Mengingat ia baru saja pulih dari operasi artroskopi lutut kanan pada Juli tahun lalu, banyak yang

memprediksi ia akan kesulitan meladeni permainan agresif Zverev.

Namun, fakta di lapangan justru sebaliknya. Hurkacz tampil beringas dengan menghujamkan total 21 ace dan hanya memberi satu kali kesempatan break point kepada Zverev sepanjang laga.

Kemenangan ini menjadi sangat emosional bagi Hurkacz yang mengakui sempat dihantui ketidakpastian selama tujuh bulan masa pemulihan yang menyiksa.

“Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya berkompetisi. Tujuh bulan saya melewati masa-masa sulit bersama tim dan itu sangat menantang,” kata Hurkacz dilansir laman resmi ATP Tour, Senin (5/1/2026).

“Kami melewati periode panjang tanpa bertanding dan tidak tahu kapan kami akan bisa kembali ke lapangan lagi. Saya hanya mencoba menghargai dan menikmati setiap momen di sini

hari ini,” sambungny

Di set kedua, momentum kemenangan Hurkacz semakin tak terbendung. Saat kedudukan imbang 3-3, ia melepaskan pukulan backhand down-the-line spektakuler yang menjadi titik balik untuk mematahkan servis Zverev.

Petenis berusia 28 tahun itu mengaku kunci kemenangannya terletak pada kenyamanan ritme servis yang langsung ia temukan sejak awal laga, membuat Zverev frustrasi dan tidak mampu mengembangkan permainan.

“Saya melakukan servis dengan cukup baik. Saya menemukan titik-titik yang bagus, jadi itu pasti perasaan yang menyenangkan untuk benar-benar memiliki ritme yang baik pada servis. Saya sangat senang dengan performa ini dan juga sangat menyenangkan bisa melihat para penggemar lagi,” pungk

Kemenangan impresif Hurkacz ini membuka jalan lebar bagi Polandia. Tugas selanjutnya kini berada di pundak petenis nomor satu dunia wanita, Iga Swiatek, yang dijadwalkan turun di partai kedua melawan Eva Lys untuk menyegel kemenangan tim Polandia atas Jerman di fase grup ini. ■ SAR

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT							
JALAN CHAIRIL ANWAR NOMOR 25, Margahayu, BEKASI Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113, Telp. : (021) 88342741							
PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANG							
No. 6162/peng-32.75 HP.02/XI/2025.							
Untuk mendapatkan Sertipikat Baru sebagai Pengganti Sertipikat Hilang, berdasarkan Ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :							
No.	Nama Pemohon	Jenis dan No.Hak	Nomor GS/SU Luas (m2)	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Letak Tanah : a. Jalan, b. Kelurahan, c. Kecamatan.	Keterangan
1	1.Rasim 2.Suryanto 3.Ratih Ratnangsih 4.Selma Tiara Sari	Hak Milik No 2857/Sumur Batu	10.05.06.08.02045 /1998 854 M2	ENING BINTI HAJI SAMIN	05-02-1998	a. c. Sumur Batu b. Bantargebang	Berdasarkan Surat Pernyataan Dibawah Sumpah Tgl. 28-10-2025
Bekasi, 12-11-2025 An.Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Ttd Tunggal Cahyoadi,S.SIT.,M.M NIP. 19720611 199203 1 001							

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I Jl. Tegar Beriman – Cibinong Bogor							
PENGUMUMAN							
Nomor : 252/Peng.KP/2025 (TENTANG SERTIPIKAT HILANG)							
Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2)Peraturan Pemerintah No.24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:							
No	a. PEMOHON b. ALAMAT	Hak Atas Tanah Jenis dan Nomor Hak	NIB	Tercatat Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Letak Jalan/Blok b. Desa/Kel c. Kecamatan	KETERANGAN
1	1. CHAIRUL NOVERI b. Jl. Jambudipa RT.002/008 Kel. Cilebut Timur, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor	HM No.4298/Cilebut Timur SU No. 2069/ Cilebut Timur/2020 Luas 89 m2	10.10.09 23.05596	CHAIRUL NOVERI	01-04-2020	a.- b.Cilebut Timur c.Sukaraja	- Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan/Barang-barang/Surat Penting dari Polres Bogor Nopol : SKTLK/4749/XI/2025/SPKT7/POLRES BOGOR/POLDA JAWA BARAT Tanggal 19-11-2025 - Surat Pernyataan dibawah Sumpah/Jangi Tanggal 11-12-2025 dibacakan dihadapan Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I
Bogor, 12 - 12 - 2025 An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN Ttd ZIMAMUN N'AM AULAWI, S.H. NIP.19871202 201101 1 003							
HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN MELALUI TELEPON YANG MENGATASNAMAKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I, BILA ANDA MENGALAMINYA DAPAT MENGHUBUNGI KAMI DI NOMOR 08110680000							

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Jalan Kembangan Utama, Komplek Perumahan Taman Permata Buana Jakarta Barat, Telp.021-962066-69			
PENGUMUMAN			
No. 818/Peng-31.73.300.HP.02.02XII/2025			
Berkenaan dengan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak seperti dibawah ini, sebelum diproses lebih lanjut, dengan ini diumumkan sebagai berikut:			
No	Nama Pemohon	Peta Bidang Tanah	LETAK TANAH
1	MARZUKI	Nomor 1385/2024 Tanggal 15-11-2024 NIB 09.03.01.01.26517 Luas 30 M ²	Jalan Pedongkelan Depan Gang Pahat No. 62A RT.001 RW. 003 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Metropolitan Jakarta Barat dengan Nomor: 6417/CXII/2025/Res Jak-Bar/SPKT tanggal 08 Desember 2025 telah dilaporkan Kehilangan Surat Tanah Berupa Girik. 1287 Persil 79 D II atas nama SAUDIN BIN KOTONG, yang berlokasi di Jalan Pedongkelan Depan Gang Pahat No. 62A RT.001 RW.003 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat.			
Kepada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman Atas Hak Permohonan Hak Atas Tanah yang dinyatakan hilang I (satu) Buth Girik atas nama SAUDIN BIN KOTONG, yang berlokasi di Jalan Pedongkelan Depan, Gang Pahat No. 62A RT. 001 RW.003 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan luas 30 M2 sebagaimana tersebut diatas, agar mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan alamat di Komplek Perumahan Taman Permata Buana Jakarta Barat, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diumumkan dalam surat kabar dengan melampirkan bukti-bukti Asli kepemilikannya;			
Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut telah berakhir dan ternyata tidak ada sanggahan/keberatan atas pengumuman kehilangan tersebut dari pihak lain, maka permohonan hak atas tanah tersebut dapat diproses sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.			
Jakarta, 31 Desember 2025 a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran TTD Drs. Bambang Pamungkas, A.Ptnh., M.H. NIP 196812091988031001			

USAHA ANDA BELUM LAKU PASANG IKLAN ANDA DISINI!

HOTLINE 021-53699507

Rakyat Merdeka

@_rakyatmerdeka

IKLAN BARIS



KEHILANGAN

Telah Hilang (SHGB) No. 01445 AN:

PT. DWIGUNATAMA RINTISPRIMA,

lIk tanah di Desa Ragamanunggal kec. Setu-Bekasi

Surat Eigendom Verp No:6184 A/n Tjio Kim Tee Nio (Hj.KIM) tanggal 22 Sept 1930. (Bhs. Belanda). Hp:081290292511

HLG BPKB & STNK Toyota Kijang Super KF 70 SHR, B 8602 BF, Abu Met, 1997, NoSin: 7K0127587, NoRa: MHF11KF7000006600, Yuli Hadiyati

HLG BPKB R2,B 3859 FOA, A/N SALLY MIRLANDA.SE, Cluster Caribbean A12 KT Deltamas BKS- Cikarang PST, Noka: MH1JFA119 DK194998, Nosin: JFA1E1190885

Hilang Bpkb Toyota Kijang Innova 2009 Hitam Met Nopol.B1100 SFV Noka: MHFXW 42G292149174 Nosin: 1TR6838222 A/n PT.Totalindo Eka Persada

HILANG AJB No.622JB/1973, Lt.150m2, An.Aryadi,Dan Surat Girik No.C 3240,Persil 28,Blok D.IV, An.Aryadi, Lok. Cililitan Kec.Kramatjati Jaktim

HLG BPKB Mbl KIA SPORTAGE, 2012,B 1858 TJG,Bambang Hermanto Aritonang, Abu Abu Tua Met,JI,Karet

Karya I No.42 Rt.5/7 Jaksel, MJJSL5 233CK001318, G4KDCS240236, TDKBERLAKULG

Telah hilang Akta Jual Beli No 873/1.711,1/X1/1989 a/n Asnidar dan Girik C No 2609 Persil 19 Blok D11 a/n Julaeha,luas: 124M2 RI003/002 Petukangan utara.

Telah Hilang BPKB mbl Mercedes benz C300AT,Nopol B308 HUN, Noka MHL205083L J004600. Nosin 26492030237016.An: PT Rahasia Gadis Indonesia

HELLO AMBASSADOR

DUTA BESAR INDONESIA UNTUK ITALIA JUNIMART GIRSANG

Senang Lihat KRI Prabu Siliwangi 321 Di La Spezia

TNI AL resmi menerima kapal perang kedua buatan perusahaan Fincantieri asal Italia. Namanya KRI Prabu Siliwangi 321, kembar-an dari KRI Brawijaya 320 yang sudah duluan tiba di Indonesia.

Upacara serah terima KRI Prabu Siliwangi 321 ini digelar pada 22 Desember 2025 di galangan kapal Fincantieri di Muggiano, La Spezia, Italia.

Upacara tersebut dihadiri Kepala Angkatan Laut (KASAL) TNI Laksamana Muhammad Ali, Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Italia Junimart Girsang, Direktur Utama Fincantieri Pierroberto Folgiero, Manajer Umum Divisi Kapal Angkatan Laut Fincantieri Eugenio Santagata dan Kepala Angkatan Laut Italia Laksamana Giuseppe Berutti Bergotto.

Dubes Junimart mengaku senang, akhirnya KRI Prabu Siliwangi 321 bisa mulai melaut.

"Terharu saat melihat bendera merah putih akhirnya berkibar di tiang tertinggi kapal," katanya



Dubes Junimart Girsang (kanan) bersama Laksamana Muhammad Ali usai serah terima KRI Prabu Siliwangi 321 di Italia, 22 Desember 2025.

donesia dan sampai pada pekan kedua bulan ini.

Dalam keterangan KBRI Roma, KRI Prabu Siliwangi 321 memiliki spesifikasi sama dengan KRI Brawijaya 320 yang sudah berada di Koarmada II sejak September lalu.

KRI Prabu Siliwangi 321 merupakan kapal perang terbesar dan termutakhir yang dimi-

liki Indonesia saat ini. Kapal ini dilengkapi teknologi modern, sistem persenjataan canggih, serta memiliki kemampuan tempur dan manuver tinggi.

KRI Prabu Siliwangi 321 merupakan jenis kapal tempur serbaguna (*Multipurpose Combat Ship/MCS*) atau dikenal sebagai PPA (*Pattugliatore*

Polivalente d'Altura).

PPA diklasifikasikan sebagai *Offshore Patrol Vessel* (OPV) tapi memiliki kapabilitas tempur setara fregat ringan (*light plus*).

Dengan bobot penuh mencapai sekitar 6.200 ton dan panjang 143 meter, PPA ini merupakan salah satu kapal kombatan terbesar di armada aktif TNI AL.

Dalam keterangan Fincantieri, disebutkan pengiriman unit ini menyusul pengiriman kapal sejenisnya, KRI Brawijaya-320, pada Juli 2025. Melengkapi pasokan dua kapal yang dibangun grup Fincantieri yang akan membentuk unit tempur terbesar Angkatan Laut Indonesia, serta unit yang paling canggih secara teknologi di Indo-Pasifik.

Dengan panjang keseluruhan 143 meter, kapal ini dirancang untuk melakukan berbagai misi. Termasuk operasi tempur garis depan dan patroli maritim, penyelamatan dan kegiatan perlindungan sipil.

"Kapal ini merupakan elemen strategis buat stabilitas kawasan Asia dan perlindungan kepentingan nasional Indonesia," tulis Fincantieri.

"Hal itu semakin memperkuat kemitraan kami dengan Kementerian Pertahanan Indonesia. Menegaskan komitmen kami terhadap masa depan yang lebih aman dan laut yang lebih aman," sambungnya.

Karena kembar, kemungkinan besar spek yang diusung KRI Prabu Siliwangi-321 sama persis dengan KRI Brawijaya-320. Kapal perang ini mempunyai kemampuan peperangan empat dimensi: anti-udara, anti-kapal permukaan, anti-kapal selam dan peperangan elektronika. Kecepatannya mencapai 32 knot.

Kapal ini juga dipersenjatai dengan sistem rudal permukaan ke udara (Surface to Air Missile /SAM) Aster 15 beserta peluncur vertical DCNS Sylver A43. Sistem rudal SAM Aster 15 ini dapat dipasang pada berbagai jenis kapal perang, seperti frigates, destroyer atau kapal induk.

Selain itu, juga ada meriam 127 mm Vulcano, meriam 76 mm Strales, meriam ringan 25 mm yang dilengkapi Fire-Control Radar (FCR) RTN 10X system Dardo, Peperangan Elektronika RECM, RESM dan CISM, Tactical Data Link-Y, serta Multifunction Radar Leonardo Kronos. ■ DAY

Crazy World

Sering Nge-like Foto Cewek Di Medsos, Suami Dicerai Istri



Ilustrasi sepasang suami istri bertengkar.

PENGADILAN di Turki mengeluarkan putusan bahwa seorang istri berhak bercerai kalau suaminya terbukti sering menyukai atau nge-like foto-foto perempuan lain di media sosial (medsos). Hal itu dianggap melanggar kewajiban kesetiaan dalam pernikahan.

Perkara ini bermula di Kota Kayseri, di wilayah Anatolia tengah, Turki. Seorang istri yang tidak disebutkan namanya mengajukan gugatan cerai dengan tuduhan suaminya menghina dan merendahkan-nya secara verbal. Selain itu, suaminya juga terlalu aktif di medsos dan berinteraksi dengan perempuan lain.

Sang suami membantah tuduhan tersebut. Dia balik menuduh istrinya bersikap terlalu cemburu serta menghina keluarganya. Namun, pengadilan menilai bahwa kesalahan lebih besar ada pada pihak suami, karena menimbulkan rasa tidak aman secara emosional pada istrinya.

Pengadilan memerintahkan suami membayar tunjangan bulanan sebesar 750 lira Turki

Presiden Korsel Bertemu Xi Jinping

Lee Jae Myung Boyong Pengusaha Kelas Kakap

Kunjungan Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung ke Beijing bersama 200 delegasi menjadi strategi Seoul menjaga keseimbangan di tengah rivalitas Amerika Serikat (AS)–China dan ketegangan di Asia Timur.

KORSEL melangkah hati-hati di tengah lanskap geopolitik Asia Timur yang kian bergejolak. Di antara rivalitas AS dan China, serta memanasnya hubungan Beijing–Tokyo. Upaya itu tercermin dari kunjungan kenegaraan Presiden Lee Jae Myung ke China, awal Januari 2026.

Lee tiba di Beijing Capital International Airport pada 4 Januari 2026 pukul 13.30 waktu setempat. Dari pesawat kepresidenan, dia turun bersama Ibu Negara Kim Hye-kyung. Lee tampil dengan setelan hitam berdaseras merah, sementara sang istri mengenakan mantel biru tua.

Lee datang atas undangan langsung Presiden China Xi Jinping. Kedatangannya disambut Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi China Yin Hejun, Duta Besar China untuk Korsel Dai Bing, serta Duta Besar Korsel untuk China Noh Jae-heon.

Lee tidak datang sendiri. Lebih dari 200 delegasi turut menyertainya. Melansir *South China Morning Post* (SCMP), rombongan tersebut terdiri dari para pemimpin bisnis papan atas Korsel. Di antaranya Chairman Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chairman SK Group Chey Tae-won, serta Executive Chairman Hyundai Motor Group Chung Eui-sun. Kehadiran para taipan itu menegaskan bahwa diplomasi kali ini tak hanya soal politik, tetapi juga ekonomi.

Selama empat hari, Lee di-



LAMBAIKAN TANGAN: Presiden Lee Jae Myung (kanan) melambaikan tangan saat dia dan Ibu Negara Kim Hea Kyung bersiap naik pesawat kepresidenan yang akan berangkat ke China di Bandara Seoul di Seongnam, Provinsi Gyeonggi, Minggu (4/1/2026).

jadwalkan mengunjungi Beijing dan Shanghai. Di Beijing, dia menghadiri forum bisnis Korsel–China dan melakukan pertemuan puncak dengan Presiden Xi Jinping di Istana Kepresidenan pada Senin (5/1/2026).

Selain penandatanganan sejumlah nota kesepahaman, Xi juga menggelar jamuan makan malam kenegaraan untuk menghormati tamunya.

Menurut Penasihat Utama Korsel, Wi Sung-lac, Lee juga dijadwalkan bertemu Perdana Menteri China Li Qiang pada Selasa (6/1/2026). Pertemuan ini diharapkan memperkuat komunikasi strategis di tengah ketidakpastian global.

Usai dari Beijing, Lee melanjutkan perjalanan ke Shanghai, pusat keuangan China sekaligus rumah bagi komunitas bisnis Korsel. Di

kota ini, Lee menghadiri pertemuan puncak perusahaan rintisan, serta mengunjungi bekas markas Pemerintah Korea di pengasingan pada masa penjajahan Jepang—sebuah simbol historis yang sarat pesan diplomatik.

Kunjungan ini berlangsung di tengah situasi regional yang bergejolak. Lee menari di tengah gejolak itu karena harus menavigasi persaingan AS–China, ketegangan China–Jepang, serta ancaman nuklir Korea Utara (Korut). Di saat yang sama, Korsel tetap ingin menjaga peluang kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dengan Beijing.

“China adalah mitra kerja sama yang sangat penting dalam upaya menuju perdamaian dan penyatuan di Semenanjung Korea,” ujar Lee, dikutip dari *Channel News Asia* (CNA),

Senin (5/1/2026).

Hubungan China dan Jepang berada di titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan memuncak setelah pernyataan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi pada November 2025. Saat itu, Takaichi menegaskan bahwa serangan lintas selat terhadap Taiwan dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup Jepang, dan Tokyo tidak akan ragu merespons secara militer.

Beijing meradang. Pasalnya, Negeri Tirai Bambu itu menganggap Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah China. Isu inilah yang menjadi salah satu sumber ketegangan utama di Asia Timur. Namun, Lee menegaskan Korsel tidak ingin terseret lebih jauh.

Dalam wawancara dengan

media China, CCTV, Lee menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

“Terkait isu utama China, termasuk Taiwan, kami akan terus menjunjung tinggi prinsip *One China*,” ujarnya.

Kedatangan Lee ke Beijing juga diharapkan dapat membantu menyeimbangkan isu-isu keamanan regional, termasuk ancaman nuklir Korut. Lee berharap, China dapat memainkan peran lebih aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di Semenanjung Korea.

Beberapa jam sebelum Lee bertolak ke Beijing, Korut menembakkan rudal balistik ke Laut Jepang. Militer Korsel menyebutnya sebagai uji coba rudal pertama Korut di awal 2026. Langkah ini sebagai pengingat bahwa ketegangan di kawasan belum sepenuhnya mereda.

Selama puluhan tahun, Seoul terus berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan dua tetangganya, China dan Jepang, sembari tetap menjalin kemitraan erat dengan AS sebagai penjamin utama pertahanannya.

Profesor Universitas Studi Asing Hankuk, Seoul, Kan Ju-young, menilai kunjungan ini juga mencerminkan kepentingan Beijing.

“China memandang Korsel sebagai mata rantai terlemah ketika kerja sama trilateral Korsel, Amerika Serikat dan Jepang semakin menguat,” ujarnya kepada AFP.

Di tengah perselisihan Beijing–Tokyo, Lee memilih tetap berada di luar pusaran konflik. Baginya, memihak hanya akan memperburuk ketegangan kawasan.

Dalam bidang ekonomi, dia justru mendorong kerja sama yang lebih erat.

“Korsel dan China harus bergerak menuju perdagangan yang saling menguntungkan,” pungkas Lee. ■ LDU



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I
Jl. Tegar Beriman – Cibinong Bogor

PENGUMUMAN
NOMOR : 259/Peng.KP/2025
(TENTANG SERTIPIKAT HILANG)

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

No	a. PEMOHON b. ALAMAT	Hak Atas Tanah Jenis dan Nomor Hak	NIB	Tercatat Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Letak/Blok a. Jalan/Blok b. Desa/Kel c. Kecamatan	KETERANGAN
1	a. ILHAM SUPRIYANTO b. Komp. Depok Blok B/50 RT.002/015 Kel. Pabuaran Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor	HGB No. 933/Pabuaran SU No. 108/Pabuaran/1999 Luas 100 m2	10.09.26 11.00106	ILHAM SUPRIYANTO	29-05-1999	a. Blok B No.50 b. Pabuaran c. Bojong Gede	- Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan/Barang-Barang/Surat Penting dari Polres Bogor Nopol - SKTLK4268/K/2025/SPKT/POLRES BOGOR/POLDA JAWA BARAT tanggal 15-10-2025 - Surat Pernyataan dibawah Sumpah/Janji Tanggal 18-12-2025 dibacakan dihadapan Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I

Bogor, 19 - 12 - 2025
An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BOGOR I
KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK
DAN PENDAFTARAN

TTD

ZIMAMUN NI'AM AULAWI, S.H.
NIP.19871202 201101 1 003

HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN MELALUI TELEPON YANG MENGATASNAMAKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I, BILA ANDA MENGALAMINYA DAPAT MENGHUBUNGI KAMI DI NOMOR 081110680000



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
Jalan Siliwangi No. 127 Tso. (0259) 221190
e-mail : kds-sukabumi@atrbpn.go.id

PENGUMUMAN
(Tentang Sertipikat Hilang)
No. 01, 02 Tahun 2026

Untuk mendapat Sertipikat baru sebagai Pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

No	Nama/Alamat Pemohon	Jenis Hak Atas Tanah dan No.Hak	Surat Ukur/ Gambar Situasi a. Tanggal b. Nomor c. Luas M2	Tercatat atas nama	Tanggal Pembukuan	Letak Tanah a. Jalan/Blok b. Kelurahan c. Kecamatan	Keterangan
1	VIOLITA NOVRIANI Jl. Koleberes Saleuruh RT.004 RW.007 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Waruduyung Kota Sukabumi	Hak Milik No.3314/Kel. DAYEULHUHUR	a. 13 Desember 2018 b. 02302/ DAYEULHUHUR/ 2018 c. 470 M2	VIOLITA NOVRIANI	31 Desember 2018	a. Blok Saleuruh b. Dayeuhluhur c. Waruduyung	- Berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan No. SKTLK/175X/0205/SPKT/POLRES SUKABUMI KOTAPOLDA JAWA BARAT, Tanggal 29 Oktober 2025 - Berita Acara Keterangan Kehilangan Sertifikat Tanah Hak Milik No : B/BAK/17/2025/Sat Reskrim Tanggal 29 Oktober 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Sukabumi Kota - SURAT PERNYATAAN DI BAWAH SUMPAH/JANJI tanggal 29 Desember 2025
2	FRANKY CRISTIAN KP. Benda Legok RT.01 RW.09 Desa Benda Kecamatan Cibeureum Kabupaten Sukabumi	Hak Milik No.372/Kel. SINDANGPALAY	a. 23 Juni 2008 b. 02302/ SINDANGPALAY 2008 c. 75 M2	JAMALUDIN	17 Juli 2008	a. Perum Sindangpalay Jl. Baugenville No.193 b. Sindangpalay c. Cibeureum	- Berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan No. STPU/847/IX/0205/SPKT/ POLSEK PADALARANG/POLRES CIMAHI/POLDA JAWA BARAT, Tanggal 02 September 2025 - Berita Acara Keterangan No : Sp. Ldk/847/IX/0205 Reskrim Tanggal 02 September 2025 dari POLRI Daerah Jawa Barat Resor Cimaahi Sektor Padalarang - SURAT PERNYATAAN DI BAWAH SUMPAH/JANJI tanggal 29 Desember 2025

Sukabumi, Januari 2026
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI

Cap/Ttd

Dr. Ir, HERMAN SAERI, S. SIT., M.T., Q-RMP
NIP.19730821 199403 1 001

USAHA ANDA
BELUM LAKU

PASANG IKLAN
ANDA
DISINI!

HOTLINE
021-53699507



